

Kepatuhan terhadap Rezim Anti Pencucian Uang Internasional melalui Rekomendasi FATF: Perbandingan Dua Negara

Alif Ilma Zakiah

PT Bank KEB Hana, Indonesia

Korespondensi penulis: alif.ilma@hanabank.co.id

Kata Kunci:

APUPPT-PPSPM,
Studi Komparatif,
Rekomendasi FATF

Abstrak

Indonesia resmi menjadi anggota ganda *Asia/Pacific Group* (APG) dan *Financial Action Task Force* (FATF) pada Oktober 2023, setelah sebelumnya dua kali masuk daftar abu-abu dalam dua dekade terakhir. Sementara itu, Vietnam masuk dalam Yurisdiksi di bawah Pemantauan Intensif FATF pada Juni 2023, meskipun telah menjadi anggota APG sejak Mei 2007. Perbedaan signifikan antara kedua negara ini menarik untuk diteliti mengingat keduanya sama-sama negara berkembang di Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi komparatif untuk menganalisis risiko, ancaman, dan kepatuhan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APUPPT-PPSPM) di Indonesia dan Vietnam. Analisis dilakukan menggunakan enam indikator: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Produk Domestik Bruto (PDB), regulasi APUPPT-PPSPM, Penilaian Risiko Nasional (NRA), dan *Mutual Evaluation Review* (MER). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Vietnam memiliki IPM lebih tinggi, namun PDB lebih rendah serta regulasi AML yang belum memadai. Selain itu, kedua negara memiliki risiko AML, ancaman, dan skor IPK yang serupa. Indonesia dinilai lebih berfokus pada kepentingan nasional dibandingkan internasional, yang berkontribusi pada keberhasilannya mematuhi rekomendasi FATF. Studi ini diharapkan dapat menjadi masukan penting bagi Vietnam dan negara ASEAN lainnya dalam meningkatkan kepatuhan APUPPT-PPSPM.

Dikirimkan: 2 Agustus 2024

Diterima: 5 Desember 2024

Diterbitkan: 18 Desember 2024

Copyright (c) Author



Untuk mensitasi artikel ini: Zakiah, A. I. 2024. Kepatuhan Internasional terhadap AML melalui Rekomendasi FATF: Perbandingan Dua Negara. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 3(1):102-137, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2024.v3i1.220>

Pendahuluan

Rezim internasional Anti-Pencucian Uang (*Anti Money Laundering* - AML) dipimpin oleh *Financial Action Task Force* (FATF). Hal ini terlihat dari penerapan daftar dan rekomendasi FATF sebagai kerangka kerja AML di berbagai negara.¹ FATF, bekerja sama dengan mitra regionalnya, menciptakan dan mengimplementasikan kerangka kerja terstandarisasi secara

¹ About APG (Bahasa Indonesia: Tentang APG), "Mutual Evaluations", accessed October 14, 2024

internasional untuk menangkal tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal. Mitra regional FATF di kawasan Asia-Pasifik adalah *Asia/Pacific Group* (APG). Indonesia dan Vietnam merupakan anggota organisasi ini, dimana Indonesia bergabung dengan APG pada tahun 1999, sedangkan Vietnam pada tahun 2007. Keanggotaan mereka di APG memastikan kepatuhan kedua negara terhadap FATF. Kepatuhan ini diwujudkan melalui kewajiban membuat *Mutual Evaluation Report* (MER) secara berkala sebagai anggota APG. Melalui laporan ini, FATF menganalisis risiko, langkah-langkah Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APUPPT-PPSPM), dan implementasinya di negara-negara anggota, serta memberikan skor kepatuhan terhadap rekomendasi-rekomendasi FATF. Penilaian FATF didasarkan pada efektivitas langkah-langkah dan kepatuhan teknis negara-negara tersebut. MER mencakup skor individu untuk setiap rekomendasi serta ulasan menyeluruh tentang kepatuhan negara yang bersangkutan.² Indonesia dan Vietnam telah menjalani tiga kali MER: Indonesia pada tahun 2008, 2018, dan 2022; sedangkan Vietnam pada tahun 2009, 2022, dan 2023.

Skor kepatuhan Indonesia dalam setiap MER menunjukkan fluktuasi, sejalan dengan keterlibatan negara tersebut dengan FATF. Faktor-faktor ini juga memengaruhi pembentukan rezim AML domestik di Indonesia. MER tahun 2008 disusun setelah Indonesia masuk dalam daftar *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCT) pada tahun 2001³ – 2006.⁴ NCCT adalah daftar negara dengan banyak kerentanan AML yang membutuhkan langkah-langkah pencegahan, deteksi, dan penindakan melalui kerja sama internal dan eksternal. Dengan kata lain, NCCT adalah daftar hitam/abu-abu pertama yang dibuat oleh FATF.⁵ MER 2008 juga disusun setelah Indonesia mengesahkan undang-undang AML pertamanya dan mendirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2002, setahun setelah Indonesia pertama kali masuk daftar NCCT.⁶ Selanjutnya, MER 2018 disusun setelah Indonesia menghabiskan dua tahun, antara 2012⁷ dan 2014,⁸ masuk dalam FATF Public Statement. Masuk dalam FATF Public Statement hingga 2019 berarti negara-negara tersebut memiliki rezim AML yang merugikan dan menimbulkan ancaman terhadap kerja sama domestik dan internasional dalam memerangi pencucian uang.⁹ Sebelum menyelesaikan MER 2018, Indonesia berhasil mengesahkan undang-undang AML kedua¹⁰ dan mendirikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2011.¹¹ Ketika FATF Preliminary Meeting 2023 selesai dan Indonesia dinyatakan sebagai anggota ganda FATF dan APG, pemerintah pun merayakan pencapaian ini. Pemerintah percaya

² Mutual Evaluation Home (Bahasa Indonesia: Evaluasi Timbal Balik). FATF. Accessed October 14, 2024

³ FATF – “Review to Identify Non-Cooperative Countries or Territories” (Bahasa Indonesia: FATF – Tinjauan untuk Mengidentifikasi Negara atau Wilayah yang Tidak Kooperatif). FATF, June 22, 2001.

⁴ FATF – “Review to Identify Non-Cooperative Countries or Territories” (Bahasa Indonesia: FATF – Tinjauan untuk Mengidentifikasi Negara atau Wilayah yang Tidak Kooperatif). FATF, June 23, 2006.

⁵ “About the Non-Cooperative Countries and Territories NCCT Initiative” (Bahasa Indonesia: Tentang Inisiatif NCCT Negara dan Wilayah Non-Kooperatif).” FATF. Accessed October 14, 2024

⁶ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003

⁷ FATF “Public Statement” - 16 February 2012 (Bahasa Indonesia: Pernyataan Publik FATF – 16 Februari 2012).” FATF. Accessed October 14

⁸ “Public Statement - 24 October 2014 (Bahasa Indonesia: Pernyataan Publik FATF – 24 Oktober 2014).” FATF. Accessed October 14

⁹ “Public Statement - October 2019 (Bahasa Indonesia: Pernyataan Publik FATF – Oktober 2019).” FATF. Accessed October 14

¹⁰ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹¹ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

bahwa keanggotaan ganda FATF dan APG akan memberikan dampak positif pada investasi internasional, sebagaimana disampaikan oleh Presiden¹² dan Menteri Keuangan.¹³

Respons pemerintah Vietnam terhadap kepatuhan FATF, penilaian skor MER, dan pembentukan undang-undang AML mudah ditemukan. Pada Oktober 2023, Wakil Perdana Menteri Vietnam menyuarakan keprihatinannya terhadap daftar abu-abu FATF dan dampaknya terhadap perekonomian domestik.¹⁴ Beberapa bulan kemudian, pada Februari 2024, pemerintah Vietnam mengeluarkan Rencana Aksi Nasional (*Quyết định số 194/QĐ-TTg*) yang berisi 17 tindakan untuk mencegah dan memberantas APUPPT-PPSPM, serta meningkatkan kepatuhan terhadap Rekomendasi FATF.¹⁵ Namun, kesadaran awal Vietnam tentang kepatuhan AML dapat dikategorikan terlambat. Vietnam adalah negara ASEAN terakhir yang bergabung dengan APG: Vietnam bergabung dengan APG pada tahun 2007,¹⁶ sepuluh tahun setelah organisasi tersebut didirikan.¹⁷ Pertumbuhan bertahap dalam pembentukan undang-undang AML, yang menunjukkan lambatnya kepatuhan terhadap Rekomendasi FATF, dimulai pada tahun 2009 ketika Vietnam merilis MER pertamanya.¹⁸ Meskipun pemerintah Vietnam mengeluarkan dekrit terkait AML pada tahun 2005,¹⁹ undang-undang AML baru disahkan pada tahun 2012.²⁰ Ketika Indonesia hanya membutuhkan tiga tahun sebagai anggota APG dan satu tahun dalam daftar NCCT untuk fokus mengesahkan undang-undang AML, dimana Vietnam membutuhkan waktu tujuh tahun. Fakta bahwa Indonesia berada dalam daftar NCCT mungkin mempercepat pembentukan undang-undang AML, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk Vietnam. Antara Juni²¹ hingga Oktober 2013,²² Vietnam masuk dalam daftar abu-abu FATF, namun perkembangan undang-undang AML Vietnam baru terjadi sembilan tahun kemudian. Undang-undang AML terbaru oleh pemerintah Vietnam disahkan pada tahun 2022, tahun yang sama ketika Vietnam menjalani MER kedua. Kekurangan yang ditemukan dalam MER kedua Vietnam tidak segera diatasi dalam rezim AML-nya.²³ Oleh karena itu, ketika *Follow-Up Report* (FUR) diterbitkan pada tahun 2023, laporan tersebut kembali mencantumkan Vietnam

¹² Negara, Kementerian Sekretariat. "Presiden Apresiasi Keanggotaan Penuh Indonesia Dalam FATF." Kementerian Sekretariat Negara. Accessed October 18, 2024

¹³ "Indonesia Resmi Jadi Anggota Penuh FATF, Menkeu: Bawa Dampak Positif Bagi Kredibilitas Perekonomian Negara." Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Accessed October 18, 2024.

¹⁴ "Lực Lượng Đặc Nhiệm Tài Chính Vê Chống Rửa Tiền (Bahasa Indonesia: Satgas Keuangan Bidang Pencucian Uang)." Quân đội nhân dân Việt Nam. Accessed October 21, 2024

¹⁵ "17 Hành Động Thực Hiện Cam Kết Của Việt Nam về Phòng, Chống Rửa Tiền, Tài Trợ KHỦNG BÓ (Bahasa Indonesia: Tindakan untuk Melaksanakan Komitmen Vietnam dalam Mencegah dan Memerangi Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris)." Thanh tra Việt Nam. Accessed October 21, 2024

¹⁶ "Members & Observers: Vietnam (Bahasa Indonesia: Anggota dan Pengamat: Vietnam)." Asia / Pacific Group On Money Laundering. Accessed October 21, 2024.

¹⁷ "About APG: APG History and Background (Bahasa Indonesia: Tentang APG: Sejarah dan Latar Belakang APG)." APGML. Accessed October 21, 2024. <https://apgml.org/about-us/page.aspx?p=91ce25ec-db8a-424c-9018-8bd1f6869162>.

¹⁸ "Members & Observers Document: Vietnam." Asia / Pacific Group On Money Laundering. Accessed October 21, 2024

¹⁹ Undang-Undang No.74/2005/ND-CP. The Government Socialist Republic of Vietnam (Bahasa Indonesia: Pemerintah Republik Sosialis Vietnam)

²⁰ Undang-Undang No.: 07/2012/QH13. The Government Socialist Republic of Vietnam (Bahasa Indonesia: Pemerintah Republik Sosialis Vietnam)

²¹ "FATF Public Statement - 21 June 2013 (Bahasa Indonesia: Pernyataan Publik FATF – 21 Juni 2013))." FATF. Accessed October 2, 2024

²² "FATF Public Statement, 18 October 2013 (Bahasa Indonesia: Pernyataan Publik FATF, 18 Oktober 2013)." FATF. Accessed October 2, 2024.

²³ "Vietnam's measures to combat money laundering and terrorist financing 2022 (Bahasa Indonesia: Langkah-langkah Vietnam untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris pada tahun 2022)." FATF. Accessed October 24, 2024.

dalam daftar abu-abu kedua.²⁴ Konsekuensi dari lambatnya kepatuhan Vietnam tidak hanya memengaruhi urusan domestik tetapi juga kerja sama ekonomi dengan negara lain, termasuk Indonesia.

Kerja sama ekonomi Indonesia dengan Vietnam juga terdampak oleh daftar abu-abu tersebut. Dalam upaya mematuhi R1 dan R35 Rekomendasi FATF, Indonesia mengeluarkan Pasal 41 POJK No. 8 Tahun 2023,²⁵ yang menyatakan bahwa semua penyedia jasa keuangan harus memiliki langkah-langkah penanggulangan yang memadai dan proporsional, termasuk pengisian *Enhanced Due Diligence* (EDD), sesuai dengan daftar FATF.²⁶ Dalam kasus Vietnam, ini berarti bank dan lembaga keuangan Indonesia tidak hanya harus mengisi EDD tetapi juga menyaring semua transaksi yang datang dari dan ke Vietnam. Pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan. Pertama, kondisi ini akan menghambat target perdagangan Indonesia dengan Vietnam senilai USD 18 miliar yang dicanangkan hingga tahun 2028 sebagai bagian dari rencana memperkuat Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral.²⁷ Hal ini mengharuskan Indonesia menyeimbangkan peningkatan volume dan frekuensi transaksi dengan Vietnam dengan inspeksi yang lebih ketat dan mendetail terhadap setiap transaksi. Kegagalan dalam hal ini dapat meningkatkan risiko AML di Indonesia. Kedua, risiko pencucian uang, seperti risiko ekonomi lainnya, sangat bergantung pada kondisi politik dan ekonomi masing-masing negara.²⁸ Memahami risiko pencucian uang di Vietnam menjadi hal penting untuk menjalankan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Vietnam dengan aman. Selain memprediksi kemampuan atau kegagalan Indonesia dalam memenuhi inspeksi yang ditingkatkan terhadap transaksi Indonesia-Vietnam, penelitian ini juga akan menggambarkan risiko, kondisi ekonomi, dan latar belakang politik Vietnam, serta kepatuhannya terhadap FATF dibandingkan dengan rezim AML Indonesia dan kepatuhan internasionalnya. Analisis dan penelitian tentang risiko Vietnam telah dilakukan, tetapi perbandingan dengan Indonesia untuk mengeksplorasi risiko tersebut belum dilakukan. Dalam paragraf selanjutnya, akan dibahas penelitian sebelumnya dengan bahan yang mencakup kepatuhan AML Indonesia dan negara lain, ketidakcukupan AML Vietnam, serta pemahaman tentangnya. Beberapa penelitian sebelumnya juga menemukan penjelasan mengenai konsekuensi daftar FATF dan bagaimana FATF memengaruhi negara-negara.

Penelitian sebelumnya tentang kepatuhan negara-negara terhadap AML mencakup studi politik komparatif internal Afrika Selatan oleh Tuba,²⁹ serta kepatuhan AML ASEAN yang berfokus pada regionalisme regulasi oleh Hameiri & Jones.³⁰ Penelitian yang berfokus pada kepatuhan AML Indonesia meliputi penjelasan Rengganis & Susanto³¹ tentang sejauh mana

²⁴ "Jurisdictions under Increased Monitoring - 23 June 2023 (Bahasa Indonesia: Yurisdiksi di bawah Pengawasan Ketat – 23 Juni 2023)." FATF. Accessed October 26, 2024.

²⁵ "Executive Summary MER Indonesia 2023 (Bahasa Indonesia: Ringkasan Eksekutif MER Indonesia 2023)." FATF

²⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 Tahun 2023. Otoritas Jasa Keuangan

²⁷ Pramudyani, Yashinta Difa. "Indonesia-Vietnam Sepakat Tingkatkan Target Perdagangan Bilateral 18 Miliar Dolar AS - AntaraNews." Antara News, April 24, 2024.

²⁸ Hounta, Elena, & Lehmann, Selvan. "Doing business in high risk countries (Bahasa Indonesia: Melakukan bisnis di negara-negara berisiko tinggi)." Basel Governance, Mar-Apr 2015.

²⁹ Tuba, David. "Prosecuting money laundering the FATF way: An analysis of gaps and challenges in South African legislation from a comparative perspective (Bahasa Indonesia: Menuntut pelaku pencucian uang dengan cara FATF: Analisis kesenjangan dan tantangan dalam undang-undang Afrika Selatan dari perspektif komparatif)." 2012.

³⁰ Hameiri, Shahar, and Lee Jones. "Regulatory regionalism and anti-money-laundering governance in Asia (Bahasa Indonesia: Regionalisme regulasi dan tata kelola anti pencucian uang di Asia)." Routledge, 2017.

³¹ Rengganis, Fany Dewi, & Dwi Setiawan Susanto. "Evaluation of the Anti-Money Laundering Programs Implementation in Indonesia (Bahasa Indonesia: Evaluasi Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang di Indonesia)." 2023.

implementasi program AML Indonesia telah memadai, serta analisis Ginting & Chairunissa³² yang menemukan bahwa kepatuhan Indonesia terhadap salah satu Rekomendasi FATF belum holistik, tetapi dapat diperbaiki dengan kebijakan yang sudah ada. Sementara itu, penelitian Tran & Rose³³ mengungkapkan kekurangan dalam penuntutan AML di Vietnam secara mendalam, tetapi tidak membandingkannya dengan negara lain untuk mencari solusi atas masalah tersebut. Penelitian lain tentang kekurangan AML Vietnam dilakukan oleh Tran & De Koker,³⁴ yang menemukan bahwa kepatuhan terhadap salah satu Rekomendasi FATF masih kurang karena kebijakan yang tidak memadai, kemampuan investigasi keuangan yang lemah, dan kurangnya perhatian pada investigasi penyitaan. Van Thai³⁵ mengemukakan bahwa kekurangan praktis AML di Vietnam disebabkan oleh rendahnya kemampuan Vietnam dalam pemantauan AML dan terbatasnya teknologi AML yang digunakan. Mengenai FATF, Pavlidis³⁶ menemukan bahwa signifikansi internasional FATF, meskipun sebagai organisasi soft law, sangat jelas sehingga dapat menciptakan eksklusi keuangan terhadap pihak tertentu yang tidak semestinya. Konsekuensi dari daftar FATF juga telah diteliti, meskipun tidak berfokus pada satu negara saja. Penelitian oleh Case-Ruchala et al.³⁷ menemukan bahwa daftar FATF memengaruhi pasar domestik dengan cara yang kompleks: daftar ini menjadi sinyal bagi politisi dan investor untuk mengurangi risiko dan membangun kebijakan yang lebih baik terkait APUPPT-PPSPM. Penelitian lain oleh Morse³⁸ juga menemukan bahwa daftar hitam dan abu-abu FATF dapat merusak ekonomi domestik dan mendorong negara-negara untuk lebih mematuhi kebijakan serta kerangka kerja standar internasional. Penelitian-penelitian ini menggambarkan fakta bahwa konten penelitian yang mengintegrasikan Rekomendasi dan daftar FATF dengan kebijakan serta rezim AML Indonesia dan Vietnam belum pernah dilakukan. Lebih mudah menemukan konsep-konsep tersebut dijelaskan dan diteliti secara terpisah. Esai ini adalah satu-satunya penelitian yang berfokus pada integrasi konsep-konsep tersebut secara menyeluruh. Rekomendasi FATF, daftar, serta rezim AML Indonesia-Vietnam saling terkait dan saling memengaruhi. Dengan interkoneksi ini, kesenjangan kontekstual yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya dapat dijumpatani untuk memahami risiko AML Vietnam. Akhirnya, esai ini dapat membuka kemungkinan jalan bagi Indonesia untuk membantu Vietnam mengatasi risiko AML-nya dan meningkatkan kepatuhannya terhadap FATF.

³² Ginting, Jamin, and Adessya Thalia Chairunissa. "Adopting the Financial Action Task Force (FATF) Recommendations in Realizing Beneficial Owners Transparency in Limited Companies to Prevent Money Laundering Criminal Acts in Indonesia (Bahasa Indonesia: Penerapan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam Mewujudkan Transparansi Beneficial Owner di Perseroan Terbatas untuk Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia)." 2021.

³³ Tran, Thu Thi Hoai, and Gregory Rose. "The legal framework for prosecution of money laundering offences in Vietnam (Bahasa Indonesia: Kerangka hukum untuk penuntutan tindak pidana pencucian uang di Vietnam)." 2022.

³⁴ Tran, Thu Thi Hoai, and Louis De Koker. "Confiscation of proceeds of crime in Vietnam: improving the legal framework (Bahasa Indonesia: Penyitaan hasil kejahatan di Vietnam: memperbaiki kerangka hukum)." 2021.

³⁵ Van Thai, Ha. "Anti-money laundering and countering financing of terrorism legislation in Vietnam: Criminalization, Practice and Challenges (Bahasa Indonesia: Undang-undang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Vietnam: Kriminalisasi, Praktik dan Tantangan)." 2023.

³⁶ Van Thai, Ha. "Anti-money laundering and countering financing of terrorism legislation in Vietnam: Criminalization, Practice and Challenges (Bahasa Indonesia: Undang-undang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Vietnam: Kriminalisasi, Praktik dan Tantangan)." 2023.

³⁷ Case-Ruchala, Devin, and Mark Nance. "FATF blacklists don't work the way you think they do (Bahasa Indonesia: Daftar hitam FATF tidak bekerja seperti yang Anda bayangkan)." 2020.

³⁸ Morse, Julia C. "Blacklists, market enforcement, and the global regime to combat terrorist financing (Bahasa Indonesia: Daftar hitam, penegakan pasar, dan rezim global untuk memerangi pendanaan teroris)." 2019

Untuk menggambarkan perbedaan keanggotaan FATF antara Indonesia dan Vietnam, penelitian ini akan membandingkan kedua negara berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Produk Domestik Bruto (PDB), Undang-Undang AML, Penilaian Risiko Nasional (*National Risk Assessment/NRA*), dan Laporan Evaluasi Timbal Balik (*Mutual Evaluation Report/MER*). Data dan informasi tentang variabel-variabel ini akan dikumpulkan melalui penelitian desktop kualitatif, khususnya dataset eksternal. Dataset ini bersumber dari penelitian sebelumnya, laporan badan pemerintah, undang-undang yang telah disahkan, serta laporan FATF/APG. Data kemudian dianalisis dengan studi komparatif, khususnya pendekatan komparatif ekonomi dan hukum. Pendekatan komparatif ekonomi dilakukan sebagai dasar untuk mengekstrapolasi kekuatan dan kelemahan ekonomi masing-masing negara. Berdasarkan pendekatan ini, pendekatan komparatif hukum dilakukan untuk mengukur kesiapan dan penerapan rezim AML di masing-masing negara. Hal ini didasarkan pada pemahaman tentang bagaimana negara dan hukum yang berbeda secara metodologis mencerminkan budaya lokal yang dinamis dan tradisi hukum.³⁹ Data yang dikumpulkan mencakup periode antara 2010 dan 2024, saat Indonesia dan Vietnam mengesahkan undang-undang AML terbaru mereka. Dengan perbandingan mendalam variabel ekososial ini, esai ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian tentang apa saja perbedaan dan persamaan antara Indonesia dan Vietnam dalam hal APUPPT-PPSPM. Penjelasan tentang perbedaan dan persamaan ini dapat membantu menganalisis bagaimana Indonesia dapat menggunakan kepatuhannya terhadap APUPPT-PPSPM sebagai model bagi negara-negara yang masuk daftar FATF, termasuk Vietnam.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Vietnam dan Indonesia

Diperkenalkan pada tahun 1990 oleh *United Nations Development Program* (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bertujuan untuk merangkum dan mengindeks tingkat pembangunan manusia setiap negara anggota berdasarkan tiga dimensi: kesehatan, pengetahuan, dan kesejahteraan.⁴⁰ Berdasarkan situs UNDP, dimensi kesehatan menggunakan harapan hidup saat lahir sebagai indikator, dimensi pengetahuan menggunakan rata-rata dan ekspektasi lama sekolah, dan dimensi kesejahteraan menggunakan paritas daya beli (*purchasing power parity/PPP*). Setiap indikator mengarah pada indeks dimensi tertentu: harapan hidup untuk indeks harapan hidup, rata-rata dan ekspektasi lama sekolah untuk indeks pendidikan, dan PPP untuk indeks pendapatan nasional bruto (PNB). Secara keseluruhan, elemen-elemen ini membentuk laporan IPM. Dua puluh tahun pertama pelaporan IPM penuh dengan kritik terhadap variabel yang digunakan dan metode pengindeksan. McGillivray dan White⁴¹ menjelaskan bahwa IPM berusaha menggambarkan pembangunan suatu negara melalui kemampuan sosial-ekonomi, bukan hanya kekuatan ekonomi, meskipun menghasilkan laporan pembangunan yang kurang aplikatif dalam kehidupan nyata.⁴² Perubahan pada tahun 2010 menghasilkan laporan yang lebih baik di beberapa bagian, namun tetap memiliki berbagai inkonsistensi yang perlu diperbaiki, seperti isu distribusi dan metodologi.⁴³ Dalam evolusi IPM,

³⁹ Menski, Werner F. "Comparative law in a global context: the legal systems of Asia and Africa (Bahasa Indonesia: Hukum perbandingan dalam konteks global: sistem hukum Asia dan Afrika)." 2006

⁴⁰ "Human Development Index (Bahasa Indonesia: Indeks Pembangunan Manusia)." Human Development Reports, June 4, 2024.

⁴¹ McGillivray, Mark, and Howard White. "Measuring development? The UNDP's human development index (Bahasa Indonesia: Mengukur pembangunan? Indeks pembangunan manusia UNDP)."

⁴² Sagar, Ambuj D., and Adil Najam. "The human development index: a critical review (Bahasa Indonesia: Indeks pembangunan manusia: tinjauan kritis)."

⁴³ Herrero, Carmen, Ricardo Martínez, and Antonio Villar. "A newer human development index." *Journal of Human Development and Capabilities* 13, no. 2 (2012): 247-268.

muncul kritik lebih lanjut. Kritik mengenai tidak digunakannya variabel keberlanjutan,⁴⁴ variabel Islam untuk negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI),⁴⁵ serta variabel pembangunan berkelanjutan⁴⁶ banyak ditemukan dalam penelitian sejak tahun 2010-an hingga 2020-an. Meskipun awal yang tidak stabil dan kritik yang terus berlanjut, IPM berhasil menjadi instrumen kebijakan yang praktis dalam mendorong kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat secara global.⁴⁷ IPM juga menjadi bagian integral dari kemampuan suatu negara untuk menjadi berkelanjutan, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Kummur et al.⁴⁸ dan Castells-Quintana et al.⁴⁹ Selain itu, IPM menjadi dasar berbagai penelitian mengenai hubungan antara kesehatan, kesetaraan, dan kesejahteraan, seperti yang terlihat dalam penelitian Cabasag et al.,⁵⁰ Mirahmadizadeh et al.⁵¹ dan Mahdavi et al.⁵² Berdasarkan fakta ini, dapat disimpulkan bahwa IPM dapat menjadi dasar untuk memperkirakan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat Indonesia dan Vietnam. Estimasi ini diperlukan untuk memahami kondisi sosial di kedua negara, yang kemudian dapat dikorelasikan dengan variabel lainnya. Korelasi ini dapat dilakukan berdasarkan pengaruh kebijakan dan kepatuhan AML terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sikman et al.⁵³ menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi suatu negara bergantung pada kepercayaan investor terhadap bagaimana pemerintah menangani pencucian uang dan kejahatan moneter lainnya. Ketergantungan ini dapat memengaruhi tingkat PNB, yang pada gilirannya memengaruhi IPM. Hubungan ini bukan hubungan langsung, melainkan moderat, tetapi tetap relevan dalam penelitian terkait kepatuhan dan kebijakan AML suatu negara.

⁴⁴ Biggeri, M., & Mauro, V. (2018). Towards a more "Sustainable" Human Development Index: Integrating the environment and freedom (Bahasa Indonesia: Menuju Indeks Pembangunan Manusia yang Lebih "Berkelanjutan": Mengintegrasikan Lingkungan dan Kebebasan).

⁴⁵ Anto, M. B. "Introducing an Islamic human development index (I-HDI) to measure development in OIC countries (Bahasa Indonesia: Memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia Islam (IPM-I) untuk mengukur pembangunan di negara-negara OKI)."

⁴⁶ Zhang, Yixin, and Zhijie Wu. "Environmental performance and human development for sustainability: Towards a new Environmental Human Index (Bahasa Indonesia: Kinerja lingkungan dan pembangunan manusia untuk keberlanjutan: Menuju Indeks Lingkungan dan Manusia yang baru)."

⁴⁷ Dervis, Kemal, and Jeni Klugman. "Measuring human progress: the contribution of the Human Development Index and related indices (Bahasa Indonesia: Mengukur kemajuan manusia: kontribusi Indeks Pembangunan Manusia dan indeks terkait)."

⁴⁸ Yumashev, Alexei, Beata Ślusarczyk, Sergey Kondrashev, and Alexey Mikhaylov. "Global indicators of sustainable development: Evaluation of the influence of the human development index on consumption and quality of energy (Bahasa Indonesia: Indikator global pembangunan berkelanjutan: Evaluasi pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap konsumsi dan kualitas energi)."

⁴⁹ Castells-Quintana, David, Vicente Royuela, and Fabian Thiel. "Inequality and sustainable development: Insights from an analysis of the human development index (Bahasa Indonesia: Ketimpangan dan Pembangunan Berkelanjutan: Wawasan dari Analisis Indeks Pembangunan Manusia)."

⁵⁰ Zeng, Ziqian, Jiali Chen, Changfeng Xiao, and Weizhong Chen. "A global view on prevalence of hypertension and human development index (Bahasa Indonesia: Pandangan global tentang prevalensi hipertensi dan indeks pembangunan manusia)."

⁵¹ Mirahmadizadeh, Alireza, Mousa Ghelichi-Ghojogh, Mohebat Vali, Kimia Jokari, Haleh Ghaem, Abdolrasool Hemmati, Fatemeh Jafari et al. "Correlation between human development index and its components with COVID-19 indices: a global level ecologic study (Bahasa Indonesia: Korelasi antara indeks pembangunan manusia dan komponen-komponennya dengan indeks COVID-19: studi ekologi tingkat global)."

⁵² Mahdavi, Neda, Farhad Towhidi, Behnam Reza Makhssosi, Reza Pakzad, Ali Moini, Abbas Ahmadi, Sarah Lotfi, and Hamid Salehiniya. "Incidence and mortality of nasopharynx cancer and its relationship with human development index in the world in 2012 (Bahasa Indonesia: Insiden dan mortalitas kanker nasofaring serta hubungannya dengan indeks pembangunan manusia di dunia tahun 2012)."

⁵³ Šikman, Mile M., and Miloš Grujić. "Relationship of Anti-Money Laundering Index with GDP, financial market development, and Human Development Index (Bahasa Indonesia: Hubungan Indeks Anti Pencucian Uang dengan PDB, Perkembangan Pasar Keuangan, dan Indeks Pembangunan Manusia)."

Hubungan moderat ini juga diamati oleh Dell’Anno et al.⁵⁴ dalam studi kasus Iran, yang menemukan bahwa meskipun angka hasil perbandingan variabel AML dan IPM tidak terlalu signifikan, secara keseluruhan terdapat efek positif di antara keduanya.

Indonesia berada di peringkat ke-112 dari 193 negara dalam *Human Development Report* (HDR) 2023-2024.⁵⁵ Meskipun peringkatnya cukup rendah, Indonesia masih masuk dalam kategori pembangunan manusia tinggi. Indonesia memiliki harapan hidup saat lahir sebesar 68,3 tahun, ekspektasi lama sekolah 14,0 tahun, dan PNB per kapita sebesar 12.046 USD. Harapan hidup Indonesia lebih rendah 4 tahun dibandingkan rata-rata dunia yang mencapai 72 tahun pada 2022.⁵⁶ Namun, setelah pandemi COVID-19, harapan hidup di Indonesia tetap berada dalam trajektori positif, seperti terlihat pada 2021-2022 yang mencapai 67,6 tahun, hanya 0,7 tahun lebih rendah dibandingkan angka 2023-2024.⁵⁷ Hasibuan et al.⁵⁸ menemukan bahwa lebih dari setengah provinsi di Indonesia memiliki angka harapan hidup lebih rendah dari rata-rata nasional pada tahun 2019. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa anggaran nasional untuk sektor kesehatan serta tingkat kemiskinan di setiap provinsi sangat memengaruhi jumlah tahun harapan hidup saat lahir. Di Indonesia, terbukti bahwa semakin baik akses layanan kesehatan dan determinan lainnya untuk harapan hidup, semakin baik pula perkembangan ekonominya.⁵⁹ Syafri et al.,⁶⁰ Hamzah et al.,⁶¹ dan Nainggolan et al.⁶² sepakat bahwa pemerintah daerah provinsi memiliki kapasitas yang besar dalam memengaruhi skor IPM di Indonesia. Dari penelitian tersebut, ditemukan bahwa pendanaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi untuk mendukung sekolah-sekolah lokal merupakan determinan utama dalam peningkatan IPM, khususnya pada indikator ekspektasi lama sekolah.

Sementara itu, Vietnam berada di peringkat ke-107 dalam HDR 2023-2024, hanya lima peringkat lebih tinggi dari Indonesia, dan berada di unit yang sama dalam kategori pembangunan manusia tinggi. Vietnam memiliki harapan hidup saat lahir sebesar 74,6 tahun, ekspektasi lama sekolah 13,1 tahun, dan PNB per kapita sebesar 10.814 USD. Peringkat Vietnam yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia sebagian besar disebabkan oleh perbedaan

⁵⁴ Dell’Anno, Roberto, and Majid Maddah. "Money laundering, corruption and socioeconomic development in Iran: an analysis by structural equation modeling (Bahasa Indonesia: Pencucian uang, korupsi dan pembangunan sosial ekonomi di Iran: analisis dengan pemodelan persamaan structural)."

⁵⁵ "Human Development Report 2023/2024 (Bahasa Indonesia: Laporan Pembangunan Manusia 2023/2024)." UNDP.

⁵⁶ "Life Expectancy at Birth, Total (Years) (Bahasa Indonesia: Harapan Hidup saat Lahir, Total (Tahun))." World Bank Open Data. Accessed November 5, 2024.

⁵⁷ "Human Development Report 2021/2022 (Bahasa Indonesia: Laporan Pembangunan Manusia 2021/2022)." UNDP.

⁵⁸ Hasibuan, Syarif, Ede Darmawan, and Vetty Permanasari. "Socioeconomic disparities of life expectancy: Analysis of 34 provinces in Indonesia as of 2019 (Bahasa Indonesia: Kesenjangan sosial ekonomi harapan hidup: Analisis 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2019)."

⁵⁹ Daindes, Tommy, Heru Subyantoro, Karno Karno, and Meirinaldi Meirinaldi. "The Effect of Access to Health Services, Health Financing, Health Status and Social Status on Life Expectancy and Their Impact on Economic Growth (Bahasa Indonesia: Pengaruh Akses Pelayanan Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Status Kesehatan dan Status Sosial terhadap Harapan Hidup dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi)."

⁶⁰ Syafri, Sumiyarti, Khoriro Handayani Firdayeti, and K. Handayani. "Determinants of human development index: Case study of provinces in Indonesia (Bahasa Indonesia: Faktor-faktor yang Menentukan Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Provinsi-provinsi di Indonesia)."

⁶¹ Saputro, Suhendi Ery, Muhammad Zilal Hamzah, and Budi Santosa. "Determinant Factors of Human Development and Its Impact on Level of Productivity in ASEAN Countries (Bahasa Indonesia: Faktor Penentu Pembangunan Manusia dan Dampaknya terhadap Tingkat Produktivitas di Negara-negara ASEAN)."

⁶² Nainggolan, Lora Ekana, Darwin Lie, Nana Triapnita Nainggolan, and Robert Tua Siregar. "How Determinants of the Human Development Index Impact Indonesia (Bahasa Indonesia: Bagaimana Faktor Penentu Indeks Pembangunan Manusia Berdampak pada Indonesia)."

signifikan dalam harapan hidup. Pertumbuhan konsisten harapan hidup Vietnam melampaui banyak negara Asia,⁶³ dan, serupa dengan Indonesia, faktor paling berdampak adalah sistem kesehatan dan aksesnya.⁶⁴ Penelitian juga menemukan bahwa tata kelola Vietnam hanya memberikan efek positif pada sisi politik pembangunan manusia,⁶⁵ yang berarti bahwa IPM Vietnam sangat bergantung pada penerapan tata kelola tersebut, bukan tata kelola itu sendiri. Hal ini dibuktikan oleh Van Dai⁶⁶ yang menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan memengaruhi IPM Vietnam antara 2010-2014. Mengenai perubahan iklim, Vietnam menjadi contoh utama untuk migrasi iklim akibat kerusakan lingkungan yang diangkat dalam *Human Development Report* 2023-2024.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Korupsi selalu menjadi fenomena yang sulit untuk diukur (Galtung;⁶⁷ Miller;⁶⁸ and Heywood et al.⁶⁹), tetapi keberadaannya sangat mengakar baik di dunia modern (Huntington⁷⁰) maupun di masa lalu (Mulinge et al.;⁷¹ Rubinstein;⁷² Obydenkova et al.⁷³). Meskipun demikian, pemerintah dunia telah mencoba mengukur kejahatan ini, seperti yang terlihat dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK), *Worldwide Governance Indicator*, *International Country Risk Guide*, *Global Corruption Barometer*, dan *Global Integrity Index*. Pentingnya pengindeksan korupsi berkaitan dengan upaya anti-korupsi dalam politik global, yang biasanya dilakukan melalui tiga pendekatan: berdasarkan persepsi korupsi, menggunakan komposit dari satu sumber data tunggal, dan indikator proksi (Rohwer⁷⁴). Pengindeksan dan pelaporan IPK dilakukan oleh *Transparency International* melalui pengumpulan data dari tiga belas sumber data yang didasarkan pada persepsi ahli dari dua belas institusi independen mengenai persepsi korupsi di sektor publik.⁷⁵ Penggunaan indeks persepsi untuk mengukur korupsi membantu meningkatkan

⁶³ Vinh, Luu Dinh, and Nguyen Minh Tri. "Human Development in Vietnam: A Systematic Review (Bahasa Indonesia: Pembangunan Manusia di Vietnam: Tinjauan Sistematis)."

⁶⁴ Nguyen, Anh. "Factors Affecting Life Expectancy in Vietnam, Laos, Cambodia (Bahasa Indonesia: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harapan Hidup di Vietnam, Laos, dan Kamboja)."

⁶⁵ Quang, Ngo. "Good Governance and Human Development in Vietnam: Spatial Empirical Evidence (Bahasa Indonesia: Tata Kelola yang Baik dan Pembangunan Manusia di Vietnam: Bukti Empiris Spasial)."

⁶⁶ Nguyễn, Văn Đại. "Policy Implications for Human Development of Vietnam from the History of HDI (Bahasa Indonesia: Implikasi Kebijakan terhadap Pembangunan Manusia di Vietnam dari Sejarah IPM)."

⁶⁷ Galtung, Fredrik. "Measuring the immeasurable: Boundaries and functions of (macro) corruption indices (Bahasa Indonesia: Mengukur hal yang tidak terukur: Batasan dan fungsi indeks korupsi (makro))."

⁶⁸ Miller, William L. "Perceptions, experience and lies: What measures corruption and what do corruption measures measure? (Bahasa Indonesia: Persepsi, pengalaman dan kebohongan: Apa yang mengukur korupsi dan apa yang diukur oleh ukuran korupsi?)."

⁶⁹ Heywood, Paul M., and Jonathan Rose. "'Close but no Cigar': the measurement of corruption (Bahasa Indonesia: 'Hampir tapi Tidak Berhasil': Pengukuran Korupsi)."

⁷⁰ Huntington, Samuel P. "Modernization and corruption (Bahasa Indonesia: Modernisasi dan korupsi)."

⁷¹ Mulinge, Munyae M., and Gwen N. Lesetedi. "Interrogating our past: colonialism and corruption in Sub-Saharan Africa (Bahasa Indonesia: Mempertanyakan masa lalu kita: kolonialisme dan korupsi di Afrika Sub-Sahara)."

⁷² Rubinstein, William D. "The end of 'old corruption (Bahasa Indonesia: Akhir dari 'korupsi lama' di Inggris 1780–1860)" in Britain 1780–1860."

⁷³ Obydenkova, Anastassia, and Alexander Libman. "Understanding the survival of post-communist corruption in contemporary Russia: The influence of historical legacies (Bahasa Indonesia: Memahami kelangsungan hidup korupsi pasca-komunis di Rusia kontemporer: Pengaruh warisan sejarah)."

⁷⁴ Rohwer, Anja. "Measuring corruption: a comparison between the transparency international's corruption perceptions index and the World Bank's worldwide governance indicators (Bahasa Indonesia: Mengukur korupsi: perbandingan antara indeks persepsi korupsi dari Transparency International dan indikator tata kelola global dari Bank Dunia)."

⁷⁵ "Corruption Perceptions Index: Frequently Asked Questions (Bahasa Indonesia: Indeks Persepsi Korupsi: Pertanyaan yang Sering Diajukan)." Transparency International. Accessed December 1, 2024

kepercayaan masyarakat terhadap masyarakat dan pemerintah, yang berujung pada keuntungan ekonomi dan politik, seperti keputusan investasi dan partisipasi politik.⁷⁶ Penelitian ini akan menggunakan IPK sebagai data utama untuk menganalisis ancaman dan skor korupsi di Indonesia dan Vietnam karena IPK telah dikenal luas dan memiliki reliabilitas yang dibuktikan oleh Kilkon et al.⁷⁷ dan Zouaoui et al.⁷⁸

Skor IPK berkisar dari 0 (paling korup) hingga 100 (paling jujur). Baik Indonesia maupun Vietnam berada di tengah-tengah skala tersebut. Indonesia memperoleh skor 34 bersama enam negara lainnya, sedangkan Vietnam memperoleh skor 41 bersama empat negara lainnya. Karena keduanya berada di tengah-tengah, *Transparency International* mengklasifikasikan Indonesia dan Vietnam sebagai negara dengan demokrasi yang cacat. Selain itu, keduanya juga mencetak skor di bawah 50, sejalan dengan dua pertiga negara di dunia. Bahkan, sebagian besar populasi global hidup di bawah rata-rata skor IPK dunia yang berada pada angka 43. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Vietnam menghadapi ancaman dan masalah korupsi yang serupa, yang dalam konteks penelitian ini, dapat mengarah pada lebih banyak atau lebih parahnya kasus pencucian uang. Probabilitas ini cukup tinggi, mengingat IPK menggunakan berbagai segmen korupsi yang memengaruhi sektor publik seperti pencegahan korupsi, pengendalian korupsi, akuntabilitas pejabat publik, dan dampak sosial dari korupsi. Terakhir, Vietnam menunjukkan peningkatan skor yang signifikan sejak 2018, dengan tambahan 8 poin dari skor tahun tersebut. Informasi ini diperoleh dari *Corruption Perception Index (CPI) Report 2023*⁷⁹ dan *CPI Report 2023 Full Score Description*.⁸⁰

Produk Domestik Bruto (PDB) Vietnam dan Indonesia

Sejak awal keberadaannya dan meskipun memiliki berbagai kekurangan, Produk Domestik Bruto (PDB) selalu digunakan untuk mengukur kekuatan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan oleh kemampuannya dalam menyajikan data secara sederhana, karakteristiknya yang tertanam dalam sistem internasional, hubungannya dengan pertumbuhan politik, serta penggunaannya yang beragam dalam aspek ekonomi, politik, dan sosial.⁸¹ Hingga saat ini, PDB menjadi indikator utama untuk menggambarkan kondisi ekonomi nasional. Praktik ini juga akan digunakan dalam esai ini, mengingat kemampuan PDB untuk menunjukkan kekuatan dan perkembangan ekonomi. Hubungan antara PDB dan variabel-variabel pembangunan ekonomi suatu negara telah menjadi fokus penelitian selama bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Rumania pada tahun 2006 menemukan bahwa pertumbuhan PDB hingga $\pm 8\%$ dapat menurunkan tingkat suku bunga hipotetis mendekati 0%.⁸² Dalam studi kasus Brasil, ditemukan bahwa antara 1995 dan 2009 terdapat hubungan positif antara aliran investasi portofolio asing,

⁷⁶ Donchev, Dilyan, and Gergely Ujhelyi. "What do corruption indices measure? (Bahasa Indonesia: Apa yang diukur indeks korupsi?)."

⁷⁷ Ko, Kilkon, and Ananya Samajdar. "Evaluation of international corruption indexes: Should we believe them or not? (Bahasa Indonesia: Evaluasi indeks korupsi internasional: Haruskah kita mempercayainya atau tidak?)."

⁷⁸ Zouaoui, Azzouz, Anas Al Qudah, and Mounira Ben-Arab. "World corruption perception index analysis (Bahasa Indonesia: Analisis indeks persepsi korupsi dunia)."

⁷⁹ Transparency International. "Corruption Perceptions Index 2023 (Bahasa Indonesia: Indeks Persepsi Korupsi 2023)." Accessed December 1, 2024

⁸⁰ Transparency International. "Corruption Perceptions Index 2023 (Bahasa Indonesia: Indeks Persepsi Korupsi 2023): Full Source Description (Bahasa Indonesia: Indeks Persepsi Korupsi 2023: Deskripsi Sumber Lengkap)." Accessed December 1, 2024

⁸¹ Gaukroger, Cressida. "A critical assessment of GDP as a measure of economic performance and social progress (Bahasa Indonesia: Penilaian kritis terhadap PDB sebagai ukuran kinerja ekonomi dan kemajuan sosial)."

⁸² Lucian-Liviu, A. L. B. U. "Trends in the interest rate–investment–GDP growth relationship (Bahasa Indonesia: Tren hubungan antara suku bunga–investasi–pertumbuhan PDB)."

PDB, dan investasi.⁸³ Dalam penelitian yang dilakukan di 79 negara antara 1980 hingga 2010, ditemukan bahwa konsumsi, pendapatan, dan PDB saling terkait: mereka saling memengaruhi di semua negara, dengan peningkatan dan penurunan mencerminkan standar hidup masyarakat berdasarkan konsumsi dan pendapatan.⁸⁴ PDB juga memiliki hubungan positif dengan Indeks AML. Dalam penelitian tahun 2020, ditemukan bahwa negara-negara Eropa dengan PDB PPP per kapita yang tinggi memiliki skor risiko Anti Pencucian Uang yang jauh lebih rendah dalam Basel AML Index. Oleh karena itu, untuk memahami kesehatan ekonomi, standar hidup, dan kekuatan ekonomi internasional Indonesia dan Vietnam, PDB akan digunakan sebagai indikator.

Data *International Monetary Fund* (IMF) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, PDB Indonesia mencapai USD 1,37 triliun. Ini merupakan peningkatan sebesar USD 500 miliar dibandingkan tahun 2022, meskipun pertumbuhan ekspor terbatas akibat perlambatan ekonomi global dan harga komoditas internasional yang lebih rendah.⁸⁵ Pada tahun 2023, PDB Indonesia dipimpin oleh sektor industri manufaktur, yang menyumbang hingga 18,67% dari total PDB.⁸⁶ IMF memproyeksikan bahwa PDB Indonesia akan mencapai USD 1,48 triliun pada tahun 2024, meningkat 8% dari tahun 2023. Di sisi lain, PDB Vietnam mencapai USD 433,7 miliar pada tahun 2023, meningkat USD 25,73 miliar dari tahun 2022.⁸⁷ Pada tahun 2023, PDB Vietnam sebagian besar terdiri dari sektor industri manufaktur, yang menyumbang 23,88% dari total PDB, atau sekitar USD 10,4 miliar.⁸⁸ Elektronik dan komponen komputer menjadi kontributor utama barang yang diproduksi dan diekspor pada tahun 2023.⁸⁹ IMF memproyeksikan bahwa pada tahun 2024, PDB Vietnam akan mencapai USD 465,81 miliar, meningkat sebesar USD 32,11 miliar. Proyeksi ini dihitung dari berbagai data, termasuk volume ekspor. Penelitian menunjukkan bahwa volume ekspor sangat memengaruhi PDB.⁹⁰ Seperti yang telah disebutkan, meskipun ada pertumbuhan PDB sebesar USD 500 miliar, ekspor Indonesia pada tahun 2023 secara umum mengalami penurunan yang cukup signifikan. Terjadi penurunan ekspor sebesar 11,33% antara tahun 2023 dan 2022,⁹¹ dimana total ekspor Indonesia pada tahun 2023 adalah USD 258,7 miliar.⁹² Sebagai perbandingan, total ekspor Vietnam pada tahun 2023

⁸³ Meurer, Roberto. "Portfolio investment flows, GDP, and investment in Brazil (Bahasa Indonesia: Arus investasi portofolio, PDB, dan investasi di Brasil)."

⁸⁴ Diacon, Paula-Elena, and Liviu-George Maha. "The relationship between income, consumption and GDP: A time series, cross-country analysis (Bahasa Indonesia: Hubungan antara pendapatan, konsumsi dan PDB: Analisis lintas negara, deret waktu)."

⁸⁵ Bank Indonesia. "Economic Growth in Indonesia Accelerated in Q4/2023 (Bahasa Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melompat Pada Triwulan IV/2023)." Accessed September 28, 2024

⁸⁶ "Indonesia: GDP Share by Sector 2023 (Bahasa Indonesia: Indonesia: Pangsa PDB menurut Sektor 2023)." Statista, October 24, 2024.

⁸⁷ IMF. "IMF Country Reports: Vietnam (Bahasa Indonesia: Laporan Negara IMF: Vietnam)." September 2024.

⁸⁸ "GDP contribution of the manufacturing sector in Vietnam from 2018 to 2023 (Bahasa Indonesia: Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB di Vietnam dari tahun 2018 hingga 2023)." Statista, October 24, 2024.

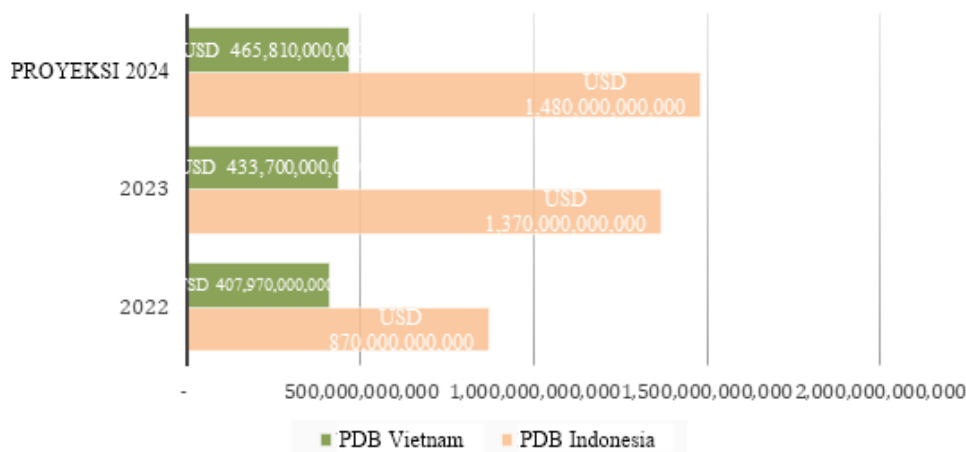
⁸⁹ "Vietnam Import Data (Bahasa Indonesia: Data Impor Vietnam)." TradeImex. Accessed September 24, 2024.

⁹⁰ Mahadika, Iman Naufal, Salih Kalayci, and Nihal Altun. "Relationship between GDP, foreign direct investment and export volume: Evidence from Indonesia (Bahasa Indonesia: Hubungan antara PDB, investasi asing langsung dan volume ekspor: Bukti dari Indonesia)."

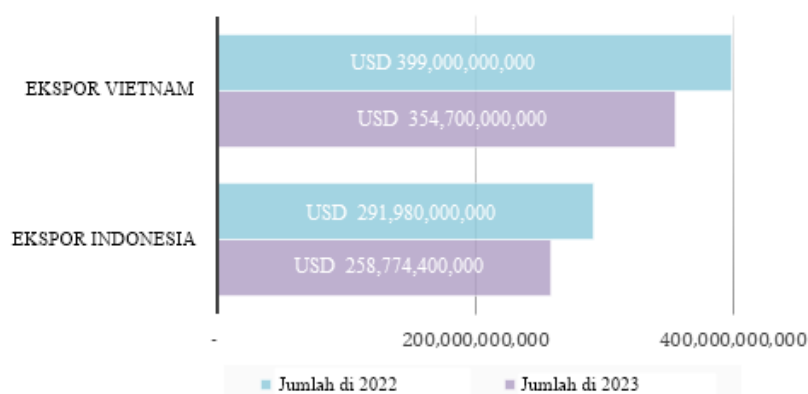
⁹¹ "Ekspor Desember 2023 Mencapai US\$22,41 Miliar, Naik 1,89 Persen Dibanding November 2023 Dan Impor Desember 2023 Senilai US\$19,11 Miliar, Turun 2,45 Persen Dibanding November 2023."

⁹² "Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor, 2023, Buku I." Badan Pusat Statistik Indonesia. Accessed October 29, 2024.

adalah USD 354,7 miliar, turun 4,6% dari tahun 2022.⁹³ Meskipun penurunan ekspor Vietnam lebih kecil dibandingkan Indonesia, dapat dikatakan bahwa penurunan tersebut sejalan dengan jumlah PDB yang dimiliki kedua negara. Sebagai kesimpulan, kedua negara memiliki kesenjangan yang cukup besar dalam hal perbandingan PDB. Hal ini juga berarti bahwa ekonomi Indonesia lebih tangguh dibandingkan Vietnam, meskipun pasar manufaktur Vietnam seharusnya mampu menarik lebih banyak investor, yang pada akhirnya menciptakan pasar lebih besar dan menghasilkan PDB yang lebih tinggi.



Gambar 1. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan Vietnam



Gambar 2. Total Ekspor Indonesia dan Vietnam

Undang-Undang Anti Pencucian Uang (AML) di Indonesia dan Vietnam

Secara sekilas, dapat ditemukan bahwa Indonesia memiliki empat kebijakan utama terkait APUPPT-PPSPM. Kebijakan tersebut meliputi satu undang-undang utama anti pencucian uang, satu undang-undang utama pencegahan pendanaan terorisme, satu peraturan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM) utama dari PPATK, dan satu peraturan anti pencucian uang utama dari OJK. Namun, berdasarkan Laporan Penilaian Risiko Nasional Indonesia tahun 2021, Indonesia melaporkan bahwa terdapat delapan undang-undang dan peraturan utama terkait APUPPT-PPSPM, dengan tahun legislasi berkisar antara 2010 hingga 2021. Undang-undang utama AML adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 yang

⁹³ “Tổng Cục Hải Quan Việt Nam (Bahasa Indonesia: Departemen Umum Bea Cukai Vietnam).” Tổng cục Hải Quan Việt Nam. Accessed October 29, 2024. <https://www.customs.gov.vn/index.jsp?pageId=4967&tkId=7164>.

menggantikan Undang-Undang No.15 Tahun 2002. Sementara itu, tujuh peraturan lainnya meliputi peraturan terkait prosedur pelaporan (2 peraturan), prosedur PPATK (2 peraturan), arus masuk dan keluar uang tunai internasional (1 peraturan), pembentukan komite koordinasi nasional (1 peraturan), dan penerapan pemilik manfaat (1 peraturan).⁹⁴ Berdasarkan NRA yang sama, tercatat bahwa Indonesia juga memiliki 64 peraturan lainnya terkait APUPPT-PPSPM,⁹⁵ termasuk peraturan dari OJK. Peraturan utama APUPPT-PPSPM dari OJK adalah POJK No. 8 Tahun 2023, yang merupakan penyempurnaan dari dua peraturan sebelumnya: POJK No. 23 Tahun 2019 dan POJK No. 12 Tahun 2017. Untuk undang-undang CFT, terdapat Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 yang fokus pada pendanaan terorisme. Sedangkan untuk peraturan CPF, peraturan umum yang digunakan adalah POJK No. 8 Tahun 2023, namun terdapat peraturan spesifik, yaitu Peraturan PPATK No. 14 Tahun 2023. Bank Indonesia juga memiliki peraturan tambahan terkait AML, seperti Peraturan Bank Indonesia No.19/10/PBI/2017. Dari ringkasan ini, terlihat bahwa Indonesia memiliki banyak kebijakan yang diperbarui secara berkala. Dalam praktik AML domestik, Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 juga menjadi dasar pembentukan PPATK.⁹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara nyata dan sesuai waktu. Undang-undang dan peraturan ini juga menetapkan bahwa setiap lembaga keuangan Indonesia beroperasi di bawah pengawasan PPATK, OJK, dan Bank Indonesia untuk mematuhi rezim AML domestik. Berdasarkan peninjauan menyeluruh terhadap kebijakan ini, ditemukan bahwa POJK No. 8 Tahun 2023 merupakan peraturan yang paling sesuai dengan Rekomendasi FATF. Hal ini masuk akal mengingat peraturan ini adalah regulasi APUPPT-PPSPM terbaru setelah Penilaian Risiko Nasional Indonesia 2018 dan sebelum Penilaian Risiko Nasional 2022, serta setelah Indonesia terpilih sebagai anggota ke-40 FATF.

Pada tahun 2023, Vietnam juga mengesahkan undang-undang AML baru yang menggantikan undang-undang sebelumnya. Undang-undang baru ini disebut Undang-Undang No. 14/2022/QH15 yang menggantikan Undang-Undang No. 07/2012/QH13. Keduanya berfokus pada AML, dengan undang-undang terbaru juga mencakup CFT, tetapi kurang memadai dalam mengatur CPF. Untuk mendukung implementasi Undang-Undang No. 14/2022/QH15, Vietnam memiliki Surat Edaran dari Bank Negara Vietnam, yaitu Surat Edaran 09/2023/TT-NHNN sebagai panduan implementasi AML, dan Keputusan Perdana Menteri, yaitu Keputusan 194/QD-TTg sebagai Rencana Aksi Nasional untuk APUPPT-PPSPM.⁹⁷ Berdasarkan tinjauan terhadap Undang-Undang No. 14/2022/QH15, ditemukan bahwa beberapa bagian terkait AML tidak tertulis dalam tiga peraturan AML tersebut. Sebagai contoh, undang-undang tentang sanksi dan hukuman bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme tidak tercantum dalam peraturan AML khusus, tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Vietnam No. 100/2015/QH13 untuk sanksi pidana.⁹⁸ Selain itu, Vietnam tidak memiliki ketentuan pidana terkait CPF baik dalam undang-undang AML baru maupun lama. Hal ini menjadi masalah besar, karena undang-undang AML baru disahkan setelah Laporan Evaluasi Bersama tahun 2018. Penggunaan Laporan Evaluasi Timbal Balik (MER) tidak hanya menilai kepatuhan suatu negara sebagaimana ditulis, tetapi juga perubahan dan penyesuaian kebijakan AML di masa depan agar sesuai dengan FATF. Tinjauan singkat terhadap undang-

⁹⁴ PPATK, Indonesia National Risk Assessment (NRA) on Money Laundering 2021 (Bahasa Indonesia: Penilaian Risiko Nasional (NRA) Indonesia terhadap Pencucian Uang Tahun 2021), 44

⁹⁵ PPATK, Indonesia National Risk Assessment (NRA) on Money Laundering 2021 (Bahasa Indonesia: Penilaian Risiko Nasional (NRA) Indonesia terhadap Pencucian Uang Tahun 2021), 45-56

⁹⁶ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003. Undang-Undang No. 15 Tahun 2002. Bab V. (2002)

⁹⁷ SBV, Vietnam - National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorism Financing (Bahasa Indonesia: Vietnam - Penilaian Risiko Nasional Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme), 3-4

⁹⁸ Criminal Sanction and Punishment, Criminal Code No. 100/2015/QH13. Chapter XI. Article 324 (Bahasa Indonesia: Sanksi Pidana dan Hukuman, KUHP No. 100/2015/QH13. Bab XI. Pasal 324). 197-198

undang AML Vietnam ini menunjukkan beberapa poin penting. Pertama, Vietnam kekurangan kebijakan AML yang holistik sehingga kurang memadai dalam menerapkan hukuman dan sanksi terkait APUPPT-PPSPM. Kedua, meskipun menggantikan undang-undang lama, regulasi dalam undang-undang baru masih kurang sesuai dengan Rekomendasi FATF—contohnya, undang-undang ini hanya mengatur *Politically Exposed Person* (PEP) asing, tetapi tidak mengatur PEP domestik. Ketiga, banyak kerangka regulasi dalam undang-undang baru ditulis secara umum, bukan dalam bab dan/atau pasal yang spesifik. Penjelasan lebih lanjut tentang undang-undang AML Vietnam dan Indonesia dapat ditinjau pada variabel keempat, yaitu Laporan Evaluasi Timbal Balik Vietnam dan Indonesia.

Tabel 1. Ringkasan Nilai Rekomendasi FATF untuk Indonesia dan Vietnam

Hukum/Peraturan Lama	Hukum/Peraturan Baru	Negara
UU No. 15 year 2002	UU No. 8 year 2010	Indonesia
POJK No. 23 year 2019	POJK No. 8 year 2023	Indonesia
UU No. 07/2012/QH13	UU No. 14/2022/QH15	Vietnam

Penilaian Risiko Nasional (NRA) Vietnam dan Indonesia

Antara FATF, Bank Dunia, dan IMF, masing-masing memiliki metode berbeda untuk melakukan penilaian mandiri terhadap risiko Pencucian Uang (*Money Laundering* - ML/Pendanaan Terorisme (*Financing Terrorism* - FT)/Pendanaan Proliferasi (*Financing of Proliferation* - PF) secara domestik, namun ketiganya menekankan pentingnya bentuk pelaporan mandiri ini. FATF secara khusus merekomendasikan pelaporan mandiri agar negara-negara dapat sepenuhnya memahami, benar-benar menyadari, dan pada akhirnya mampu menerapkan langkah-langkah melawan ancaman ML/FT/PF berdasarkan risiko domestik (FATF, 2013). Pada tahun 2021, Indonesia melakukan Penilaian Risiko Nasional (NRA) keduanya, sementara Vietnam melakukan NRA pertamanya pada tahun 2018. Metodologi yang digunakan kedua negara berbeda, di mana Indonesia menggunakan kombinasi praktik dari metodologi FATF, Bank Dunia, dan IMF,⁹⁹ sedangkan Vietnam hanya menggunakan metodologi Bank Dunia.¹⁰⁰ Format data yang dikumpulkan juga berbeda, Indonesia menggunakan data kuantitatif dan kualitatif, sementara Vietnam hanya menggunakan data kuantitatif. Indonesia mengumpulkan data kuantitatif dari laporan para ahli, dan data kualitatif dari data statistik terkait laporan dan hasil dari lembaga terkait. Variabel yang digunakan dalam NRA Indonesia berasal dari berbagai peraturan, undang-undang, dan kebijakan terkait APUPPT-PPSPM. Data kuantitatif Vietnam berasal dari statistik, informasi domestik, dan sumber terbuka. Data ini dikumpulkan melalui kuesioner yang diajukan kepada lembaga penegak hukum dan pengawas, lembaga keuangan, Bisnis dan Profesi Non-Keluangan yang Ditunjuk (*Designated Non-Financial Businesses and Professions* - DNFBP), serta sektor ekonomi dari komite provinsi setempat.

NRA Indonesia menggunakan tindak pidana asal (*predicate crimes*) berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 untuk menganalisis ancaman APUPPT-PPSPM.¹⁰¹ NRA Vietnam, karena menggunakan metodologi Bank Dunia, menganalisis setiap kasus tindak pidana asal secara terpisah. Secara singkat, NRA Vietnam menerjemahkan sifat, skala, dan konsekuensi

⁹⁹ PPATK, Indonesia National Risk Assessment (NRA) on Money Laundering 2021 (Bahasa Indonesia: Penilaian Risiko Nasional (NRA) Indonesia terhadap Pencucian Uang Tahun 2021), 8

¹⁰⁰ SBV, Vietnam - National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorism Financing (Bahasa Indonesia: Vietnam - Penilaian Risiko Nasional Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme), 4-5

¹⁰¹ PPATK, Indonesia National Risk Assessment (NRA) on Money Laundering 2021 (Bahasa Indonesia: Penilaian Risiko Nasional (NRA) Indonesia terhadap Pencucian Uang Tahun 2021), 197-200

yudisial dari setiap kasus tindak pidana asal menjadi ancaman APUPPT-PPSPM di Vietnam. Dua puluh tindak pidana asal yang dicatat dalam NRA Indonesia setara dengan ancaman APUPPT-PPSPM yang dicatat dalam NRA Vietnam.¹⁰² Beberapa tindak pidana tersebut termasuk korupsi dan tindak pidana terkait korupsi, narkoba, kejahatan di sektor keuangan (perbankan, perpajakan), serta tindak pidana terkait perdagangan manusia (penyelundupan imigran dan pekerja). Tindak pidana asal yang disebutkan oleh Indonesia namun tidak disebutkan oleh Vietnam mencakup kejahatan terkait kepabeanan, prostitusi, pencurian, dan penculikan. Sebaliknya, tindak pidana asal yang disebutkan oleh Vietnam namun tidak disebutkan oleh Indonesia mencakup kejahatan terkait barang terlarang, kejahatan sektor DNFBP, dan kejahatan sektor kasino. Terdapat pula kejahatan yang bersifat eksklusif untuk masing-masing negara, yaitu kejahatan dengan ancaman hukuman lebih dari 4 tahun di Indonesia, dan kejahatan terkait penggelapan properti di Vietnam. Tiga tindak pidana asal dengan risiko tertinggi di Indonesia adalah korupsi (9,00/10), narkoba (7,24/10), dan kejahatan di sektor perpajakan (6,74/10). Sementara itu, tindak pidana asal dengan risiko tertinggi di Vietnam adalah penggelapan properti (bagian dari tindak pidana korupsi), narkoba, perjudian, dan kejahatan terkait sektor real estat. Berdasarkan ringkasan ini, dapat dilihat bahwa di Vietnam, hasil dari kejahatan cenderung dicuci melalui sektor real estat. Sementara itu, berdasarkan NRA Indonesia, hasil dari kejahatan biasanya dicuci melalui perusahaan cangkang dan korporasi ilegal. Meskipun terdapat perbedaan dalam metodologi, variabel, dan sumber data, Indonesia dan Vietnam memiliki tindak pidana asal dengan risiko tinggi yang serupa. Hal ini menunjukkan bahwa pada akhirnya, Vietnam dapat belajar dari kepatuhan APUPPT-PPSPM yang diterapkan di Indonesia.

Laporan Evaluasi Timbal Balik Vietnam dan Indonesia

Untuk mendukung dan memastikan kepatuhan negara-negara terhadap standar dan Rekomendasi FATF, semua anggota *FATF-Style Regional Bodies* (FSRB) diwajibkan untuk menyelesaikan Laporan Evaluasi Timbal Balik (selanjutnya disebut MER). Laporan ini merangkum kepatuhan terhadap standar dan Rekomendasi FATF, dengan lampiran analisis tentang undang-undang, penuntutan, dan penerapan kebijakan negara terkait kepatuhan terhadap FATF. Analisis ini menilai kepatuhan domestik dengan kategori *Compliant* (Patuh), *Largely Compliant* (Sebagian Besar Patuh), *Partially Compliant* (Sebagian Patuh), dan *Not Compliant* (Tidak Patuh) — dengan *Compliant* sebagai hasil terbaik dan *Not Compliant* sebagai yang terburuk. Laporan ini dibuat melalui tinjauan sejawat secara berkala dengan bantuan FSRB. Karena laporan ini menganalisis secara mendalam regulasi, prosedur, dan proses hukum APUPPT-PPSPM domestik, laporan ini menjadi indikator yang baik untuk kemampuan APUPPT-PPSPM domestik dan kepatuhan terhadap FATF (Pavlidis, 2020). Baik Indonesia maupun Vietnam telah menyelesaikan MER mereka pada tahun 2022.

Ditemukan bahwa dari 40 Rekomendasi FATF, Indonesia dinilai *Largely Compliant* terhadap 29 di antaranya. Tidak ada rekomendasi yang diberi label *Not Compliant*, sementara 6 di antaranya *Compliant* dan 5 *Partially Compliant*.¹⁰³ Hasil ini sangat berbeda dengan MER milik Vietnam, dimana 23 Rekomendasi FATF diberi label *Partially Compliant*, 11 diberi label *Largely Compliant*, 2 diberi label *Compliant*, dan 4 diberi label *Not Compliant*.¹⁰⁴ Tingkat kepatuhan ini hanya memberikan informasi mendasar: bahwa Indonesia mematuhi

¹⁰² SBV, Vietnam - National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorism Financing (Bahasa Indonesia: Vietnam - Penilaian Risiko Nasional Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme), 6

¹⁰³ FATF, Mutual Evaluation Report Indonesia 2023 (Bahasa Indonesia: Laporan Evaluasi Timbal Balik Indonesia 2023), 2023, 14

¹⁰⁴ FATF, Vietnam Mutual Evaluation Report 2022 (Bahasa Indonesia: Laporan Evaluasi Timbal Balik Vietnam 2022), 2022, 213-221

Rekomendasi FATF dalam berbagai tingkatan, sementara Vietnam tidak mematuhi sepenuhnya 4 rekomendasi tersebut. Dengan mengaitkan tingkat kepatuhan ini dengan risiko masing-masing negara serta konteks Rekomendasi FATF, dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kerentanan APUPPT-PPSPM suatu negara secara keseluruhan.

Tabel 2. Ringkasan Nilai Rekomendasi FATF untuk Indonesia dan Vietnam.

Indonesia	Vietnam	Nilai
R.3, R.14, R.18, R.20, R.29-30	R.30, R.33	<i>Compliant</i>
R.1-2, R.4-5, R.9-13, R.15-17, R.19, R.2, R.4-5, R.8-9, R.31-32, R.36-37, R.21-24, R.26-27, R.31-40	R.39, R.40	<i>Largely Compliant</i>
R.6-8, R.25-28	R.1, R.3, R.6, R.10-11, R.13-14, R.16-29, R.34, R.38	<i>Partially Compliant</i>
N/A	R.7, R.12, R.15, R.25	<i>Not Compliant</i>

Untuk menunjukkan kerentanan Vietnam terhadap APUPPT-PPSPM terkait Rekomendasi FATF, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap undang-undang dan regulasi AML Vietnam. Sebagaimana dijelaskan dalam bagian kedua subbab variabel, kebijakan AML Vietnam yang tidak memadai cukup fatal. Lebih dari setengah Rekomendasi FATF tidak diadopsi sepenuhnya dalam undang-undang dan regulasi AML Vietnam: 23 Rekomendasi diberi label *Partially Compliant* dan 4 Rekomendasi diberi label *Not Compliant*. Karena terdapat terlalu banyak Rekomendasi yang tidak sepenuhnya relevan dengan risiko APUPPT-PPSPM Vietnam, subbab ini akan menjelaskan dua rekomendasi yang berlabel *Partially Compliant* dan satu rekomendasi dengan label *Not Compliant*. Rekomendasi ini dipilih berdasarkan tingkat kepatuhan dan risiko Indonesia dan Vietnam. Rekomendasi tersebut adalah R.3) Pelanggaran pencucian uang, R.12) Pejabat yang terekspos secara politik, dan R.20) Pelaporan transaksi mencurigakan.

Rekomendasi ke-3 (tindak pidana pencucian uang) dan Rekomendasi ke-20 (pelaporan transaksi mencurigakan) telah sepenuhnya dipatuhi (*Compliant*) oleh Indonesia, namun hanya sebagian dipatuhi (*Patially Compliant*) oleh Vietnam. Rekomendasi ke-3 menstandarkan kriminalisasi pencucian uang, baik yang berkaitan dengan tindak pidana berat lainnya dan/atau tindak pidana asal (FATF, 2023). Kepatuhan Indonesia terhadap rekomendasi ini terkait dengan keberagaman dan luasnya rezim dan praktik AML yang dimiliki. Kelemahan Vietnam yang menyebabkannya mendapatkan nilai *Partially Compliant* terkait dengan rezim AML-nya yang masih dasar. Dasar hukum Vietnam untuk kriminalisasi AML hanya disebutkan satu kali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Vietnam No. 100/2015/QH13: hukuman penjara 1–10 tahun dan denda sebesar VND 20.000.000 hingga VND 100.000.000 (~USD 800 hingga ~USD 4.000).¹⁰⁵ FATF menilai bahwa hukuman ini tidak memadai karena Konvensi Wina dan Palermo tidak sepenuhnya diimplementasikan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tidak mencakup berbagai tindak pidana asal yang menjadi profil risiko Vietnam. Selain itu, hukuman dan denda ini hanya berlaku untuk orang hukum dan beberapa entitas hukum tertentu, yang berarti bahwa AML untuk beberapa bentuk entitas hukum lainnya tidak diatur. Namun, tidak seperti Indonesia, Vietnam menerapkan kriminalisasi AML untuk entitas hukum NPO, sehingga terdapat kepatuhan terhadap Rekomendasi ke-3, meskipun minimal. Untuk rezim dan praktik AML Indonesia, kepatuhan terhadap FATF dapat diidentifikasi melalui 60

¹⁰⁵ Criminal Sanction and Punishment, Criminal Code No. 100/2015/QH13. Chapter XI. Article 324 (Bahasa Indonesia: Sanksi Pidana dan Hukuman, KUHP No. 100/2015/QH13. Bab XI. Pasal 324). 198

undang-undang, regulasi, dan kebijakan yang terkait dengan APUPPT-PPSPM. Regulasi ini tidak hanya mengatur tindak pidana tetapi juga prosedur dan sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi, memproses, dan melaporkan tindakan, risiko, serta ancaman pencucian uang pada orang hukum dan mayoritas entitas hukum lainnya. Regulasi terkait prosedur dan sistem ini juga mendukung kepatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi ke-20.

Untuk mematuhi rekomendasi pelaporan transaksi mencurigakan, Indonesia menggunakan OJK, BI, dan PPATK untuk bekerja sama menegakkan hukum dan membantu pelapor mengidentifikasi serta melaporkan transaksi mencurigakan. Meskipun masih sederhana, Indonesia telah memasukkan aturan pelaporan transaksi mencurigakan dalam undang-undang AML pertama pada tahun 2002.¹⁰⁶ Pembentukan PPATK untuk mengumpulkan dan memproses laporan juga didasarkan pada undang-undang AML pertama tersebut, yang semakin memperkuat kepatuhan Indonesia terhadap rekomendasi ini. Undang-undang AML pertama Vietnam juga telah mencakup regulasi untuk pelaporan transaksi, tetapi dianggap tidak memadai karena tidak adanya pedoman pelaporan dan hanya berlaku untuk lembaga kredit.¹⁰⁷ Undang-undang AML terbaru Vietnam belum disahkan saat MER diterbitkan, tetapi untuk memberikan investigasi AML yang menyeluruh, Undang-undang baru ini akan dibahas. Dalam hal pelaporan transaksi mencurigakan, Undang-undang terbaru Vietnam mencakup entitas pelapor yang lebih luas dibandingkan dengan yang lama, serta memiliki pasal khusus untuk pelaporan transaksi mencurigakan, yaitu Pasal 26. Undang-undang baru ini bahkan memiliki dua pasal khusus untuk mendeteksi, menentukan, dan membedakan transaksi mencurigakan, baik untuk lembaga keuangan maupun DNFBP.¹⁰⁸ Selain itu, Undang-undang baru ini mengatur bentuk laporan, tenggat waktu, serta larangan anti *tipping off* dalam pelaporan transaksi mencurigakan. Perbaikan ini menunjukkan bahwa Vietnam sangat menyadari kekurangan kepatuhan pelaporannya dan langsung menangani masalah tersebut dengan mengatur setiap aspek pelaporan transaksi mencurigakan. Sayangnya, karena Vietnam belum menerbitkan NRA terbarunya, belum ada laporan tentang bagaimana Undang-undang baru ini diterapkan dalam praktik nyata. Selain itu, perlu disebutkan bahwa Vietnam hanya memiliki Bank Negara Vietnam (*State Bank of Vietnam* - SBV) yang memproses semua laporan transaksi mencurigakan, tidak seperti Indonesia yang memiliki PPATK. Bagaimana hal ini akan memengaruhi Vietnam dalam mempertahankan Undang-undang baru, khususnya pasal-pasal pelaporan transaksi mencurigakan, masih belum dapat dinyatakan secara jelas.

Baik Indonesia maupun Vietnam memiliki risiko AML yang tinggi akibat korupsi. Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menunjukkan tren penurunan, sedangkan skor Vietnam pada indeks yang sama menunjukkan tren peningkatan tetapi tidak pernah melebihi angka 45. Kedua negara mengakui risiko ini, sebagaimana tercermin dalam NRA mereka, di mana korupsi (termasuk suap serta penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan) dianggap sebagai tindak pidana asal berisiko tinggi untuk AML. Hal ini menunjukkan bahwa kedua negara membutuhkan regulasi yang proporsional untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh korupsi. Salah satu regulasi atau proses AML yang dapat mengendalikan risiko dari korupsi adalah pemberian label, penyaringan, dan pemrosesan *Politically Exposed Persons* (PEP). Pemberian label PEP akan membantu entitas pelapor menyaring dan memproses klien mereka sesuai dengan tingkat risikonya. Rekomendasi ke-12 adalah rekomendasi yang dirancang untuk mengatasi risiko PEP. Rekomendasi ini bertujuan mencegah kemungkinan penggunaan lembaga entitas pelapor untuk mencuci uang dari tindakan ilegal

¹⁰⁶ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003. UU No. 15 Tahun 2002. Bab IV. (2002)

¹⁰⁷ Prevention Of Money Laundering, Law No.: 07/2012/QH13. Chapter II. Article 16 (Bahasa Indonesia: Pencegahan Pencucian Uang, UU No.: 07/2012/QH13. Bab II. Pasal 16). 6-7

¹⁰⁸ Anti-Money Laundering, Law No. 14/2022/QH15. Section 2. Article 26 (Bahasa Indonesia: Undang-Undang Anti Pencucian Uang Nomor 14 Tahun 2022/QH15. Ayat 2. Pasal 26). 16-17

yang dilakukan oleh PEP, termasuk korupsi sebagai tindak pidana asal. Indonesia sebagian besar mematuhi (*Compliant*) Rekomendasi ini, sementara Vietnam sama sekali tidak mematuhi (*Not Compliant*). Kepatuhan Indonesia terhadap PEP dapat dilihat dari regulasi, proses, dan penerapan di dunia nyata yang holistik. Indonesia telah mengakui pemberian label PEP sejak tahun 2010¹⁰⁹ dan secara spesifik mengkategorikannya sejak tahun 2015.¹¹⁰ Sejak saat itu, Indonesia membangun basis data nasional yang dapat diakses oleh entitas pelapor, aparat penegak hukum, otoritas pengatur dan pengawas, serta organisasi terkait AML lainnya. Pemanfaatan basis data ini diatur dalam regulasi khusus, yaitu Peraturan PPATK No. 11 Tahun 2020. Berdasarkan fakta-fakta ini, jelas bahwa Indonesia telah menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana korupsi dapat mengganggu rezim pencucian uang di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan kesiapan Indonesia untuk melawan pencucian uang melalui penerapan regulasi dalam praktik nyata.

Sementara itu, Vietnam hanya mewajibkan entitas pelapor untuk melakukan *Enhanced Due Diligence* (EDD) terhadap PEP asing, meskipun memiliki tingkat korupsi yang hampir sama dengan Indonesia. Ini merupakan kelemahan yang mencolok dalam pemahaman risiko Vietnam dan langkah-langkah pencegahannya. Tanpa kewajiban untuk memberikan label, menyaring, dan memproses PEP domestik dan organisasi, risiko pencucian uang melalui tindak pidana asal korupsi menjadi lebih tinggi di Vietnam. Yang lebih memberatkan adalah fakta bahwa bahkan untuk PEP asing, proses persetujuan hubungan dengan mereka tidak sepenuhnya diatur.¹¹¹ Hal ini berarti bahwa EDD yang berkelanjutan tidak dilakukan baik terhadap PEP asing, domestik, maupun organisasi. Selain itu, *Related Party Accounts* (RCA) juga tidak diatur, sehingga memungkinkan PEP dengan mudah menempatkan hasil ilegal mereka ke rekening keluarga mereka. Dengan tingginya tingkat risiko dan rendahnya EDD, dapat disimpulkan bahwa risiko dan proses *due diligence* PEP di Vietnam berkorelasi negatif. Masalah lebih lanjut dari korelasi negatif ini adalah bahwa bahkan dalam Undang-Undang AML terbaru Vietnam, masih terdapat kekurangan regulasi tentang PEP. Baik Undang-Undang AML sebelumnya maupun yang terbaru di Vietnam hanya menyebutkan EDD untuk PEP asing dalam Pasal 17. Jika dibandingkan dengan kepatuhan parsial Undang-Undang AML baru Vietnam terhadap Rekomendasi ke-20, ketidakpatuhan untuk PEP sangat mengkhawatirkan. Hal ini semakin menunjukkan keraguan rezim AML holistik di Vietnam dan keyakinan yang salah bahwa PEP domestik Vietnam tidak memerlukan EDD penuh. Dengan informasi yang terdapat dalam MER masing-masing negara dan variabel lainnya, beberapa temuan komparatif dapat diidentifikasi.

Diskusi terkait Perbandingan Kedua Negara

Perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan Vietnam telah dilakukan dalam beberapa penelitian sebelumnya. Putri¹¹² menemukan bahwa antara tahun 1990-2021, pertumbuhan IPM Indonesia lebih lambat dibandingkan Vietnam, dengan selisih 0,92%. Temuan ini akurat berdasarkan peringkat *Human Development Report* (HDR) 2023-24.

¹⁰⁹ Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010. Bab I-II. (2010)

¹¹⁰ Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-02/1.02/PPATK/02/15. Bab I, Pasal 8. (2015)

¹¹¹ Anti-Money Laundering. Law No. 14/2022/QH15. Section 1. Article 17 (Bahasa Indonesia: Undang-Undang Anti Pencucian Uang Nomor 14 Tahun 2022/QH15. Ayat 1. Pasal 17). (2022)

¹¹² Putri, Mega Amelia, Hefrizal Handra, and Efa Yonnedi. "The role of human resource investment in increasing the human development index: Comparative study of Indonesia and Vietnam (Bahasa Indonesia: Peran investasi sumber daya manusia dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia: Studi perbandingan Indonesia dan Vietnam)."

Sementara itu, Tuan¹¹³ melakukan penelitian yang membandingkan Vietnam dengan seluruh negara ASEAN, termasuk Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Thailand memiliki indeks kemiskinan yang menurun pesat dari tahun ke tahun dibandingkan dengan IPM masing-masing negara. Terlepas dari temuan ini, Indonesia dan Vietnam memiliki kesamaan, yaitu berada dalam kategori pembangunan manusia tinggi di HDR 2023-24. Karena IPM dirancang untuk membantu merangkum dan memberi peringkat kondisi sosial-ekonomi negara yang membentuk pembangunan manusia, dapat disimpulkan bahwa perbedaan kecil dalam indikator pembangunan dan peringkat keduanya berasal dari tata kelola, kondisi sosial-ekonomi, dan masalah yang serupa. Dengan kesamaan mencolok dalam angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan nasional bruto (PNB), penelitian komparatif ini didasarkan pada kesetaraan antara Vietnam dan Indonesia. Kesimpulan ini semakin diperkuat oleh kondisi kedua negara yang memiliki kesamaan sosial-ekonomi sebagai bagian dari negara ASEAN. Perbandingan IPM kedua negara juga menyoroti fakta bahwa, meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam keanggotaan FATF, perkembangan Indonesia dan Vietnam bersifat saling melengkapi. Vietnam memiliki peringkat IPM lebih tinggi karena harapan hidup yang lebih lama, tetapi Vietnam juga memiliki kekurangan besar dalam regulasi dan kepatuhan AML. Sebaliknya, meskipun Indonesia masih berjuang meningkatkan peringkat IPM, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mempertahankan keanggotaan FATF/APG serta regulasi dan kepatuhan APUPPT-PPSPM yang baik. Oleh karena itu, IPM tidak hanya membantu menemukan landasan yang sama antara Indonesia dan Vietnam, tetapi juga mampu mengidentifikasi perbedaan tata kelola di masing-masing negara secara keseluruhan.

Dalam hal Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Vietnam secara signifikan lebih baik daripada Indonesia. Vietnam mencetak 7 poin lebih tinggi dari Indonesia, dengan peringkat masing-masing 83 dan 115. Meskipun terdapat perbedaan angka yang besar, kedua negara berada dalam kategori yang sama, yaitu di bawah rata-rata global sebesar 43. Dengan peningkatan skor yang konsisten, Vietnam memiliki peluang untuk mencapai skor di atas rata-rata global, sesuai dengan temuan Tsao¹¹⁴ yang menggambarkan pergerakan kuantil negara-negara berperingkat menengah. Namun, variabel lain dalam penelitian ini dapat menurunkan skor IPK. Selain itu, baik Indonesia maupun Vietnam dikategorikan sebagai demokrasi yang cacat (*flawed democracy*), menunjukkan bahwa kondisi sosial, politik, dan ekonomi keduanya belum optimal. Secara sosial dan ekonomi, Domashova¹¹⁵ menemukan bahwa indikator harapan hidup dan tingkat pengangguran pada IPK sangat memengaruhi penurunan korupsi, yang berdampak pada skor IPK. Secara politik, Koeswayo et al.¹¹⁶ menemukan bahwa tata kelola publik dan penerapan hukum yang tegas secara positif memengaruhi IPK di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Temuan ini juga menunjukkan keterkaitan antara IPK dan IPM seperti pada paragraf sebelumnya. Indonesia memiliki peringkat lebih rendah dari Vietnam pada IPK dan IPM, menunjukkan bahwa temuan Domashova sebagian dapat diterapkan dalam perbandingan IPM kedua negara. Dalam konteks APUPPT-PPSPM, peringkat IPK juga terhubung dengan Laporan Evaluasi Timbal Balik (MER) dan Penilaian Risiko Nasional (NRA) kedua negara.

¹¹³ Nguyen, Dinh Tuan. "Multidimensional poverty and human development of Vietnam in comparison with some Southeast Asian countries (Bahasa Indonesia: Kemiskinan multidimensi dan pembangunan manusia di Vietnam dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara)."

¹¹⁴ Tsao, Yao Chun, and Shun Jen Hsueh. "Can the country's perception of corruption change? evidence of corruption perception index (Bahasa Indonesia: Dapatkah persepsi suatu negara terhadap korupsi berubah? bukti indeks persepsi korupsi)."

¹¹⁵ Domashova, Jenny, and Anna Politova. "The Corruption Perception Index: Analysis of dependence on socio-economic indicators (Bahasa Indonesia: Indeks Persepsi Korupsi: Analisis Ketergantungan pada Indikator Sosial Ekonomi)."

¹¹⁶ Koeswayo, Poppy Sofia, Sofik Handoyo, and Dede Abdul Hasyir. "Investigating the Relationship between Public Governance and the Corruption Perception Index (Bahasa Indonesia: Meneliti Hubungan antara Tata Kelola Publik dan Indeks Persepsi Korupsi)."

MER dan NRA Indonesia serta Vietnam menekankan bahwa korupsi adalah salah satu tindak pidana asal paling dominan di masing-masing negara. Skor IPK Indonesia (34) dan Vietnam (41) menunjukkan bahwa dalam konteks AML dan poli-sosio-ekonomi, keduanya memiliki respons yang buruk terhadap korupsi.

Indonesia memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) yang jauh lebih besar dibandingkan Vietnam. Dari total PDB global sebesar USD 100 triliun, Indonesia menyumbang 1%,¹¹⁷ sedangkan Vietnam hanya 0,44%. Kedua negara menunjukkan pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 36,5% dan Vietnam sebesar 5% dalam perbandingan tahun 2022 dan 2023. Data ini menunjukkan bahwa ukuran ekonomi dan kekuatan pertumbuhan Indonesia jauh lebih besar dibandingkan Vietnam. Perbedaan ini sejalan dengan waktu pembentukan negara dan jumlah populasi masing-masing. Dalam konteks AML, keunggulan PDB Indonesia memungkinkan negara ini menjadi anggota FATF, karena ukuran PDB merupakan salah satu indikator kuantitatif untuk keanggotaan FATF.¹¹⁸ Hampir semua negara dengan PDB terbesar adalah anggota FATF, dan kepatuhan terhadap rekomendasi FATF lebih mudah dicapai oleh negara-negara dengan PDB besar karena mereka juga mendapat manfaat dari kepatuhan tersebut. Meski demikian, beberapa anggota FATF seperti Afrika Selatan tetap masuk dalam daftar abu-abu (*grey-listed*), yang menunjukkan bahwa keanggotaan FATF tidak selalu menghalangi suatu negara masuk daftar abu-abu. Ini juga menegaskan bahwa FATF mempertimbangkan politik domestik yang terkait maupun tidak terkait dengan AML sebagai indikator keanggotaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesehatan, kondisi, dan status ekonomi Indonesia secara signifikan lebih baik daripada Vietnam.

Untuk variabel keempat terkait undang-undang Anti Pencucian Uang (AML) dan penggunaannya, Indonesia menunjukkan lebih banyak kemajuan dibandingkan Vietnam. Sejak tahun 2002, Indonesia telah memperbarui, memperluas, dan mendiversifikasi undang-undang serta regulasi APUPPT-PPSPM. Indonesia telah memperbarui undang-undang/regulasi utama AML-nya dua kali: pada tahun 2010 untuk meningkatkan UU tahun 2002, dan melalui POJK 2023 untuk meningkatkan POJK tahun 2019. Meskipun regulasi kedua lebih berfokus pada kepatuhan perbankan, keduanya telah ditinjau secara menyeluruh oleh FATF. Pembaruan ini sebagian besar didasarkan pada kepatuhan terhadap Rekomendasi FATF dan sangat membantu Indonesia menjadi anggota FATF saat undang-undang dan regulasi tersebut disahkan. Karena kebijakan yang diperbarui ini mengacu pada Rekomendasi FATF, cakupan kebijakan juga meluas hingga mencakup seluruh rekomendasi FATF. Contoh sederhana dapat dilihat pada 15 jenis tindak pidana asal dalam UU No. 15 Tahun 2002 yang meningkat menjadi 24 tindak pidana asal dalam UU No. 8 Tahun 2010. Contoh lainnya termasuk UU No. 8 Tahun 2010 yang mencakup panduan pelaporan dan pengawasan yang lebih rinci, panduan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD), serta keberadaan dan pemanfaatan PPATK. Bahkan, terdapat satu bab baru tentang Investigasi Transaksi dan Penghentian Sementara. Ekspansi undang-undang dan regulasi ini mendorong Indonesia untuk mengimplementasikan setiap regulasi tersebut ke dalam industri keuangan dan *Designated Non-Financial Businesses and Professions* (DNFBP). Selain itu, Indonesia memiliki sanksi yang jelas jika undang-undang dan regulasi ini tidak diakui atau diimplementasikan. Contohnya adalah sanksi pelaporan rutin untuk institusi perbankan. Meskipun jarang diberitakan secara domestik, dalam lingkup industri diketahui bahwa jika bank melewati batas waktu pelaporan, mereka harus membayar denda kepada PPATK. Dengan adanya sanksi ini, Indonesia dapat mendiversifikasi kebijakannya untuk mengatur APUPPT-PPSPM secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat pada kebijakan yang dirancang khusus untuk industri yang memiliki risiko AML. Contoh lainnya termasuk implementasi program *Counter-Terrorism*

¹¹⁷ “GDP (current US\$) (Bahasa Indonesia: PDB (US\$ saat ini)).” Data World Bank. Accessed November 9, 2024

¹¹⁸ “Membership Criteria (Bahasa Indonesia: Kriteria Keanggotaan).” FATF. Accessed November 9, 2024

Financing (CTF) di berbagai sektor, penanganan aset yang diperoleh dari pencucian uang, dan penekanan pada keanggotaan internasional Indonesia dalam AML. Namun, meskipun terdapat ekspansi ini, undang-undang Indonesia belum banyak mengakomodasi *Counter Proliferation Financing* (CPF) dan teknologi baru, karena risiko tersebut masih relatif baru.

Vietnam juga telah memperbarui dan memperluas undang-undangnya, meskipun dilakukan lebih lambat dibandingkan Indonesia. Pengakuan AML dari perspektif kebijakan di Vietnam dimulai dengan undang-undang AML pertama yang disahkan pada tahun 2012. Pada tahun 2022, Vietnam mengesahkan undang-undang baru tentang AML untuk memperbarui undang-undang tahun 2012, dengan pendekatan yang mirip dengan undang-undang AML baru Indonesia. Undang-undang baru Vietnam ini disesuaikan dengan sebagian besar Rekomendasi FATF. Meskipun perubahan ini tidak tercermin dalam NRA dan MER Vietnam karena undang-undang tersebut disahkan setelah laporan dibuat, pembaruan tersebut tetap ada. Pembaruan undang-undang ini mencakup beberapa detail yang tidak tercantum dalam undang-undang sebelumnya, termasuk penyebutan siapa saja entitas pelapor beserta tanggung jawab mereka dalam transaksi bernilai tinggi/mencurigakan, penguatan perumusan aturan internal untuk industri terkait, dan implementasi CDD dengan retensinya. Pembaruan ini juga memperluas penilaian AML yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Vietnam, mewajibkan lebih banyak entitas untuk melakukan *Know Your Customer* (KYC), dan mengembangkan klasifikasi pelanggan terkait AML. Ekspansi ini dirancang untuk membantu menegakkan langkah-langkah pencegahan pencucian uang. Sayangnya, implementasi praktis dari kebijakan dan langkah-langkah ini masih belum jelas, karena baik undang-undang lama maupun baru tidak memiliki sanksi definitif untuk kegagalan melapor, perumusan aturan internal, dan penyitaan aset. Tidak ada pula tindakan hukuman jika badan pemerintah gagal melaksanakan tanggung jawab mereka dalam menegakkan rezim AML Vietnam. Masalah terkait sanksi yang tidak proporsional ini telah disoroti dalam MER Vietnam 2022, tetapi sayangnya belum diatasi bahkan dalam undang-undang AML baru. Persoalan ini akan dijawab pada variabel berikutnya, yaitu perbandingan NRA antara Indonesia dan Vietnam.

Berdasarkan NRA, kedua negara memiliki risiko dan ancaman yang serupa berdasarkan tindak pidana asalnya. Beberapa tindak pidana asal tidak tercermin, seperti prostitusi dan kejahatan di sektor kasino, tetapi sebagian besar tindak pidana tersebut ada di kedua negara dengan tingkat risiko yang serupa. Perbedaan dalam NRA ini terletak pada pemahaman masing-masing negara tentang risiko AML mereka. Sebagaimana tercermin dalam MER, Vietnam hanya memiliki pemahaman yang sedang berkembang terkait risiko APUPPT-PPSPM. Hal ini dapat dilihat dari pilihan Vietnam untuk hanya memasukkan konsekuensi yudisial dari tindak pidana asal. Dibandingkan dengan NRA Indonesia yang fokus pada ancaman dan kerentanan AML terlebih dahulu dan konsekuensi sebagai hal kedua, pendekatan Vietnam hanya berfokus pada seberapa banyak ancaman yang dibawa ke pengadilan. Ini berarti NRA Vietnam dilaporkan secara kualitatif dengan sistem peradilan sebagai dasar. Sayangnya, seperti dalam diskusi mengenai undang-undang AML, kebijakan AML Vietnam masih belum memadai dalam menyaring dan menghukum tindak pidana asal AML/CTF. NRA Vietnam memang diterbitkan sebelum undang-undang baru mereka disahkan, tetapi dengan ekspansi yang belum lengkap dari undang-undang AML baru Vietnam, poin bahwa NRA Vietnam cukup kurang tetap relevan. Perbedaan lain yang terlihat antara kedua NRA adalah frekuensi laporan NRA yang dilakukan. NRA Indonesia tahun 2021 adalah laporan kedua, sedangkan NRA Vietnam tahun 2018 adalah NRA pertama mereka. Ini mungkin terlihat tidak signifikan, tetapi pengalaman Indonesia melakukan NRA pada tahun 2015 membantu negara ini belajar dan beradaptasi dengan apa yang diharapkan oleh FATF dan APG. Dengan pengalaman ini, Indonesia dapat dengan jelas menyimpulkan risiko, ancaman, dan kerentanannya melalui metodologi, kerangka kerja, dan data yang tepat. Banyak bagian dari NRA Indonesia yang tidak ditemukan dalam NRA Vietnam, seperti kerangka hukum yang komprehensif, prospek kerja

sama antarorganisasi, dan penilaian risiko utama. Tanpa bagian-bagian tersebut, NRA Vietnam hanya melaporkan kemungkinan ancaman tanpa membahas secara mendalam tipologi tindak pidana asal, tanggung jawab setiap organisasi baik secara tertulis maupun dalam praktik, risiko dari skala internasional, dan ancaman yang baru muncul. Mengenai poin-poin tersebut, MER masing-masing negara mencerminkan NRA mereka, yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

MER tidak hanya digunakan untuk menilai kepatuhan terhadap Rekomendasi FATF. Dalam MER Indonesia dan Vietnam, keadaan APUPPT-PPSPM juga dibahas secara keseluruhan. MER Indonesia, baik Ringkasan Eksekutif (*Executive Summary*) 2023 maupun MER 2018, menyatakan bahwa Indonesia dapat mencerminkan pemahaman yang baik tentang risiko AML dalam NRA dan kebijakannya. Ringkasan Eksekutif dan MER juga membahas kerangka kerja yang dimiliki Indonesia untuk APUPPT-PPSPM. Kerangka kerja tersebut tidak sempurna, tetapi kekurangan yang ada selalu dinilai sebagai langkah awal menuju kepatuhan lebih lanjut. MER Vietnam tahun 2022 dan *Follow-Up Report* (FUR) 2023 menunjukkan hal serupa. Pembuat laporan membahas bagaimana rezim APUPPT-PPSPM Vietnam masih membutuhkan banyak perbaikan. Kekurangan dan ketidakcukupan dalam rezim dan kerangka kerja APUPPT-PPSPM Vietnam yang dibahas dalam MER lebih substansial dan oleh karena itu memerlukan regulasi dan implementasi lebih lanjut. Contohnya termasuk Rekomendasi tentang negara berisiko tinggi, kekuatan pengawasan, dan panduan serta umpan balik (R.19, R.27, R.34). Ketiga rekomendasi tersebut dinilai *Largely Compliant* untuk Indonesia dan *Partially Compliant* untuk Vietnam. Setiap MER mempertimbangkan cara negara dapat memenuhi rekomendasi tersebut. Dalam MER-nya, Vietnam diminta untuk menciptakan dan menerapkan langkah-langkah pencegahan seperti menambah regulasi, sistem terkontrol, dan pemanfaatan praktis. Sementara itu, Indonesia diminta untuk menerapkan sanksi yang lebih baik secara domestik sebagai langkah pencegahan proporsional terhadap tindak pidana asal berbasis lingkungan. Ringkasan Eksekutif dan MER juga memberikan saran untuk membantu rezim APUPPT-PPSPM negara-negara tersebut. Dari segi saran, Indonesia sebagian besar menerima saran terkait rezim CFT dan CPF karena tingginya risiko Indonesia terhadap pendanaan terorisme dan senjata pemusnah massal. Sebaliknya, FUR Vietnam menimbang bahwa perubahan yang dilakukan dalam rezim AML Vietnam masih tidak proporsional dan tidak dapat membenarkan penilaian ulang terhadap Rekomendasi FATF yang diminta oleh Vietnam. Saran-saran ini meniru temuan dalam perbandingan undang-undang AML: Indonesia hanya membutuhkan penyesuaian lebih lanjut dengan berbagai regulasi APUPPT-PPSPM, sedangkan Vietnam masih membangun dasar-dasar regulasi APUPPT-PPSPM secara bertahap.

Tabel 3. Perbandingan Variabel Antar Negara.

Variabel dan Data Kunci	Indonesia	Vietnam
IPM	112 dari 193, kategori Unit Pembangunan Manusia Tinggi	107 dari 193, kategori Unit Pembangunan Manusia Tinggi
IPK	Skor 34 dari 100	Skor 41 dari 100
PDB	USD 1.37 triliun	USD 433.7 miliar
UU Anti Pencucian Uang dan pemanfaatannya	Lebih dari 50 undang-undang, surat edaran, dan peraturan terkait AML, CFT, dan CPF dengan PPATK, OJK, dan BI sebagai badan pengatur utama	Jumlah regulasi yang tidak jelas, dengan hanya SBV sebagai badan regulator utama

	Beberapa peraturan digunakan untuk implementasi praktis (pembentukan PPATK, Aplikasi PEP, pedoman OJK)	Regulasi untuk implementasi praktis sangat dirusak oleh penerapannya sehari-hari
NRA	NRA Kedua, penilaian terperinci berdasarkan kebijakan internasional dan domestik dengan fokus pada faktor ancaman, kerentanan, dan konsekuensi	NRA Pertama, mendasarkan penilaian dari sifat, skala, dan konsekuensi yudisial dari pelanggaran predikat utama
FATF/APG MER	Sebagian besar diberi label <i>Largely Compliant</i> , tidak ada Rekomendasi FATF yang diberi label <i>Not Compliant</i>	Sebagian besar diberi label <i>Partially Compliant</i> , empat Rekomendasi FATF diberi label <i>Not Compliant</i>

Meskipun variabel PDB, NRA, dan MER FATF/APG berbeda secara signifikan, variabel IPM dan IPK Indonesia dan Vietnam menunjukkan kesamaan. Dalam kedua variabel ini, Vietnam memiliki peringkat lebih tinggi daripada Indonesia, meskipun tidak identik, peringkat dan skornya masih berada dalam klasifikasi yang sama. Hal ini mengilustrasikan beberapa poin. Pertama, meskipun memiliki perbedaan pada variabel lain, Indonesia dan Vietnam menghadapi tantangan, ancaman, dan masalah yang serupa dalam elemen pendidikan, kriminalitas, sosial, dan politik. Kedua, tantangan, ancaman, dan masalah ini menunjukkan bahwa jika Indonesia dapat masuk dalam daftar hitam dan abu-abu lalu bergabung dengan keanggotaan ganda APG/FATF di masa depan, maka Vietnam juga memiliki potensi yang sama. Terakhir, Vietnam masih memiliki kekuatan dan kapabilitas untuk meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi FATF, mengingat Vietnam memiliki peringkat lebih tinggi dalam variabel IPM dan IPK dibandingkan Indonesia. Meskipun ada kelemahan yang mungkin muncul dari indeks IPK dan IPM, fakta ini tetap menunjukkan bahwa kondisi Indonesia dan Vietnam memiliki kesamaan, dan Vietnam dapat secara bertahap meningkatkannya terhadap APUPPT-PPSPM.

Penelitian sebelumnya menemukan bahwa risiko ML/FT yang lebih rendah di suatu negara berkorelasi dengan pengembangan finansial yang lebih baik (Ofoeda et al., 2022) dan keamanan AML/CFT yang lebih tinggi (Manning et al., 2020). Temuan ini terbukti dalam konteks rezim AML Indonesia dan Vietnam. Meskipun tampaknya korelasi antara risiko ML/FT yang rendah dengan pengembangan finansial tidak selalu mengindikasikan kausalitas terhadap pertumbuhan ekonomi, penting untuk dicatat bahwa Indonesia telah dua kali masuk daftar abu-abu. Ketika Indonesia akhirnya keluar dari daftar tersebut pada tahun 2015, negara ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi Vietnam telah mengalami fluktuasi yang cukup besar dalam 10 tahun terakhir. Indonesia memang mengalami penurunan tajam pada tahun 2020, tetapi begitu pula Vietnam dan negara-negara lainnya akibat pandemi. Indikasi lain dari hubungan positif antara PDB dan kepatuhan AML adalah pertimbangan FATF dalam menggunakan PDB sebagai salah satu syarat keanggotaan FATF. Dalam situs webnya, FATF menjelaskan bahwa keanggotaannya terdiri dari pemerintah-pemerintah yang dapat mendanai organisasi secara rutin, meskipun ini bukan satu-satunya alasan FATF mempertimbangkan PDB. Dalam studi perbandingan ini, PDB yang tinggi menunjukkan kesiapan suatu negara untuk memenuhi dinamika kepatuhan APUPPT-PPSPM dan berkontribusi sebagai anggota FATF. Studi ini juga menyoroti kebijakan APUPPT-PPSPM Indonesia yang ekstensif, dikembangkan untuk mematuhi FATF, dan dapat terus berkembang berkat pertumbuhan PDB yang stabil. Kondisi ini dapat disebut sebagai positive feedback loop, karena bahkan sebelum Indonesia menjadi anggota FATF, PDB dan kebijakan APUPPT-

PPSPM-nya berkembang secara bersamaan. Pertumbuhan simultan ini membuka jalan bagi keamanan APUPPT-PPSPM yang tercermin dalam pengakuan ancaman AML oleh negara. Informasi terkait hal ini dapat dilihat dari kebijakan dan NRA masing-masing negara.

Karena kebijakan dan pemahaman AML negara tersebut masih minim, NRA pertama Vietnam belum memadai untuk menggambarkan ancaman APUPPT-PPSPM secara menyeluruh. Dari perbandingan NRA Indonesia dan Vietnam, dapat dilihat bahwa kebijakan AML sangat memengaruhi NRA, dan sebaliknya. Namun demikian, para peneliti menyoroti bagaimana kebijakan AML dan NRA dapat mendukung stabilitas ekonomi dan menarik investasi. Parveen¹¹⁹ menjelaskan bahwa kepatuhan AML di Inggris membantu negara tersebut menjaga waktu dan uang investor agar tidak terlalu banyak dihabiskan untuk identifikasi pelanggan. Terkait NRA, Bank Dunia¹²⁰ telah melakukan penelitian pada 8 negara maju, dan menunjukkan bahwa formulasi NRA yang tepat sangat membantu pemangku kepentingan AML dalam memahami proses AML secara real-time. Diskusi ini mendorong pemahaman masing-masing lembaga tentang risiko dan kewenangan dalam AML, CFT, dan CPF. Indonesia memahami seluk-beluk kebijakan AML secara mendalam karena perkembangannya selama dua dekade terakhir. Dengan pemahaman ini, Indonesia mampu mengembangkan NRA pertama yang kemudian memberikan pengalaman dalam mengembangkan NRA kedua. Sebaliknya, Vietnam masih mencari cara yang tepat untuk mengembangkan NRA-nya akibat pemahaman yang kurang terhadap ancaman, yang menghambat pembentukan kebijakan AML yang holistik. Tanpa kebijakan AML yang holistik, FATF dapat dengan mudah menemukan berbagai kelemahan dalam kebijakan dan proses APUPPT-PPSPM Vietnam. Kelemahan ini kemudian dicantumkan dalam MER dalam bentuk penilaian *Not Compliant* untuk beberapa rekomendasi. Empat rekomendasi yang dinilai *Not Compliant* merupakan indikasi rendahnya kesiapan Vietnam dalam menghadapi ancaman pencucian uang, yang mendorong masuknya Vietnam ke daftar abu-abu. Daftar ini memerlukan pemantauan lebih lanjut terhadap transaksi, yang berarti ancaman APUPPT-PPSPM menjadi lebih mungkin terjadi. Namun, di masa lalu, Indonesia juga telah melalui daftar ini dua kali.

Karena risiko dan ancaman terorisme, Indonesia masuk dalam daftar abu-abu pada tahun 2002 dan 2013. Daftar abu-abu pada tahun 2002 disebut *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCT), sedangkan daftar abu-abu pada tahun 2013 disebut *Jurisdictions under Increased Monitoring* (Yurisdiksi di Bawah Pengawasan Ketat). Kedua situasi tersebut muncul akibat ketidaksiapan Indonesia terhadap kebijakan CFT dan tingginya risiko organisasi/serangan teroris. Pada tahun 2015, FATF memutuskan untuk mengeluarkan Indonesia dari daftar ini berkat kemampuannya dalam mengembangkan kebijakan, proses praktis, dan satuan tugas pemerintah yang fokus pada pemberantasan terorisme. Hal ini membuktikan bahwa Vietnam juga memiliki potensi untuk keluar dari daftar abu-abu di masa depan jika mampu berfokus dan mengembangkan kebijakan APUPPT-PPSPM yang tepat. Dengan membandingkan MER kedua negara, perubahan dalam label kepatuhan Vietnam memang memerlukan waktu, tetapi tetap memungkinkan dan dapat dicapai. Vietnam dapat mempelajari pengalaman ketidakpatuhan Indonesia di masa lalu dan kepatuhan saat ini untuk membantu mengatasi kelemahan dalam kebijakan, proses, dan institusi pemerintahannya. Perbedaan besar antara kebijakan, kepatuhan, dan pelaporan Indonesia dan Vietnam semuanya dapat dikelola dan dijembatani melalui kerja sama internasional, selama Vietnam bersedia mengabdikan diri pada kepatuhan APUPPT-PPSPM yang holistik.

¹¹⁹ Parveen, Rehana. "Impact of anti-money laundering legislation in the United Kingdom and European Union (Bahasa Indonesia: Dampak undang-undang anti pencucian uang di Inggris dan Uni Eropa)."

¹²⁰ Ferwerda, Joras, & Reuter, Peter. "National Assessments of Money Laundering Risks: Learning from Eight Advanced Countries' NRAs (Bahasa Indonesia: Penilaian Nasional Risiko Pencucian Uang: Belajar dari NRA Delapan Negara Maju)." World Bank Group.

Terkait bagaimana Indonesia dapat membantu Vietnam keluar dari daftar abu-abu, jawaban yang paling memungkinkan adalah bahwa Indonesia belum memiliki perhatian besar terhadap kepentingan internasional. Masih terlalu dini untuk memprediksi bagaimana Indonesia dapat membantu Vietnam dalam konteks daftar abu-abu, mengingat Indonesia baru menjadi anggota ganda APG dan FATF setahun yang lalu. Namun, tulisan ini ingin menekankan bahwa pemerintah Indonesia memandang keanggotaan ganda APG dan FATF sebagai keuntungan domestik, bukan internasional. Hal ini terlihat dari fokus pemerintah Indonesia yang lebih terarah pada penguatan kebijakan dan prosedur APUPPT-PPSPM daripada membantu negara-negara tetangga meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi FATF. Kepentingan pemerintah Indonesia terhadap kepatuhan dan keanggotaan FATF sebagian besar didasarkan pada alasan ekonomi. Pernyataan Presiden Joko Widodo pada 17 April 2024 secara eksplisit menyebutkan bahwa investasi internasional akan menjadi manfaat terbesar dari keanggotaan ganda ini. Pernyataan ini menjadi preseden bahwa kepatuhan, keanggotaan ganda, dan pembuatan kebijakan APUPPT-PPSPM Indonesia semuanya didasarkan pada kepentingan domestik, bukan internasional. Dalam jangka panjang dan di masa depan, mungkin akan ditemukan cara bagi Indonesia untuk menerapkan kebijakan hubungan internasional “bebas aktif” terhadap kepatuhan FATF, tetapi untuk saat ini, keterlibatan Indonesia dengan FATF masih berfokus pada kepentingan nasional.¹²¹

Kesimpulan

Tulisan ini menunjukkan bahwa, pertama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Vietnam sangat bergantung pada sistematika dan aksesibilitas layanan kesehatan nasional, berbeda dengan Indonesia, meskipun peringkat keduanya berdekatan. Kedua, Vietnam memiliki peringkat lebih tinggi daripada Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK), tetapi keduanya masih diklasifikasikan dalam kategori demokrasi yang cacat. Ketiga, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara signifikan lebih tinggi daripada Vietnam pada tahun 2022-2023. Keempat, kebijakan AML Indonesia memiliki tingkat penerapan, penggunaan, dan variasi yang lebih besar dibandingkan Vietnam. Kelima, data NRA menunjukkan bahwa kedua negara memiliki risiko dan ancaman serupa berdasarkan jenis kejahatan asal (*predicate crimes*) yang sama. Keenam, laporan MER menunjukkan bahwa Vietnam dapat belajar dari pengalaman ketidakpatuhan Indonesia di masa lalu dan kepatuhan Indonesia saat ini. Terakhir, terkait aplikasi keanggotaan ganda Indonesia di APG/FATF, Indonesia lebih fokus pada kepentingan nasional dan tidak memberikan upaya ekstra untuk membantu Vietnam keluar dari daftar abu-abu.

Dari poin pertama, kedua, dan kelima, dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara kedua negara ini tidak terlalu jauh untuk dilakukan. Meskipun terdapat perbedaan, seperti pada kesimpulan kedua dan kelima, kesamaan yang ada mendukung gagasan potensi kepatuhan FATF yang serupa di masa depan. Kedua negara, sebagai anggota ASEAN, memiliki kondisi kriminalitas, sosial-ekonomi, serta ancaman dan risiko AML yang mirip. Perbedaan besar antara pengetahuan, kesiapan, dan kemampuan ekonomi untuk APUPPT-PPSPM di kedua negara semakin menegaskan bahwa perbedaan dan kesamaan ini dapat mempermudah Vietnam dalam mencapai kepatuhan terhadap FATF. Ketidakpatuhan yang sangat signifikan pada APUPPT-PPSPM di Vietnam tidak berarti negara tersebut akan selamanya berada dalam daftar abu-abu, karena Indonesia juga telah berada dalam daftar tersebut selama bertahun-tahun sebelum akhirnya menjadi anggota ganda. Dalam perbedaan dan kesamaan ini, Vietnam dapat belajar dari pengalaman Indonesia, baik ketika masuk dalam daftar abu-abu maupun saat menjadi anggota ganda. Terakhir, perbedaan GDP menunjukkan bahwa Vietnam mungkin

¹²¹ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “President Jokowi Appreciates Indonesia’s FATF Membership (Bahasa Indonesia: Presiden Jokowi Apresiasi Keanggotaan Indonesia di FATF).” 2024.

belum siap menjadi salah satu anggota ganda, tetapi kesamaan ancaman/risiko sosial dan AML setidaknya menegaskan adanya landasan yang serupa untuk kontribusi dan kolaborasi yang setara dalam kepatuhan internasional terhadap APUPPT-PPSPM di masa depan.

Daftar Pustaka

- Anto, M. B. "Introducing an Islamic human development index (I-HDI) to measure development in OIC countries (Bahasa Indonesia: Memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia Islam (IPM-I) untuk mengukur pembangunan di negara-negara OKI)." *Islamic Economic Studies* 19, no. 2 (2011). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3158957
- Badan Pusat Statistik Indonesia. "Ekspor Desember 2023 Mencapai US\$22,41 Miliar, Naik 1,89 Persen Dibanding November 2023 Dan Impor Desember 2023 Senilai US\$19,11 Miliar, Turun 2,45 Persen Dibanding November 2023." Badan Pusat Statistik Indonesia. Accessed October 28, 2024. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/01/15/2298/ekspor-desember-2023-mencapai-us-22-41-miliar--naik-1-89-persen-dibanding-november-2023-dan-impor-desember-2023-senilai-us-19-11-miliar--turun-2-45-persen-dibanding-november-2023.html>.
- Bank Indonesia. *Economic Growth In Indonesia Accelerated In Q4/2023* (Bahasa Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melompat Pada Triwulan IV/2023). Haryono, Erwin. Jakarta, Indonesia: 2024. Website, https://www.bi.go.id/en/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_262324.aspx (24th May, 2024)
- Bank Indonesia. "Economic Growth in Indonesia Accelerated in Q4/2023 (Bahasa Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melompat Pada Triwulan IV/2023)." Accessed September 28, 2024. https://www.bi.go.id/en/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_262324.aspx
- Biggeri, M., & Mauro, V. (2018). Towards a more "Sustainable" Human Development Index: Integrating the environment and freedom (Bahasa Indonesia: Menuju Indeks Pembangunan Manusia yang Lebih "Berkelanjutan": Mengintegrasikan Lingkungan dan Kebebasan). *Ecological Indicators*, 91, 220–231. doi:10.1016/j.ecolind.2018.03.045
- BPS Statistics Indonesia a. *Exports in December 2023 reached US\$22.41 billion & Imports in December 2023 reached US\$19.11 billion* (Bahasa Indonesia: Ekspor Desember 2023 mencapai US\$22,41 miliar & Impor Desember 2023 mencapai US\$19,11 miliar). Exports in December. Indonesia, 2024. Website, <https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2024/01/15/2298/exports-in-december-2023-reached-us-22-41-billion---imports-in-december-2023-reached-us-19-11-billion.html%20b> (20th May, 2024)
- BPS Statistics Indonesia b. *Indonesia's GDP Growth Rate in Q4-2023 was 5.04 percent (y-on-y)* (Bahasa Indonesia: Laju Pertumbuhan PDB Indonesia pada Triwulan IV-2023 sebesar 5,04% (y-on-y)). Indonesia's GDP Growth. Indonesia, 2024. Website <https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2024/02/05/2379/indonesia-s-gdp-growth-rate-in-q4-2023-was-5-04-percent--y-on-y-.html> (23rd May, 2024)
- Case-Ruchala, Devin, and Mark Nance. "FATF blacklists don't work the way you think they do (Bahasa Indonesia: Daftar hitam FATF tidak bekerja seperti yang Anda bayangkan)." In *Second International Research Conference on Empirical Approaches to AML and Financial Crime Suppression, Nassau, Bahamas*, pp. 27-29. 2020.
- Castells-Quintana, David, Vicente Royuela, and Fabian Thiel. "Inequality and sustainable development: Insights from an analysis of the human development index (Bahasa Indonesia: Ketimpangan dan Pembangunan Berkelanjutan: Wawasan dari Analisis Indeks

- Pembangunan Manusia)." *Sustainable Development* 27, no. 3 (2019): 448-460. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/sd.1917>
- Daindes, Tommy, Heru Subyantoro, Karno Karno, and Meirinaldi Meirinaldi. "The Effect of Access to Health Services, Health Financing, Health Status and Social Status on Life Expectancy and Their Impact on Economic Growth (Bahasa Indonesia: Pengaruh Akses Pelayanan Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Status Kesehatan dan Status Sosial terhadap Harapan Hidup dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi)." In *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2022*, 16 April 2022, Semarang, Indonesia. 2022.
- Dell'Anno, Roberto, and Majid Maddah. "Money laundering, corruption and socioeconomic development in Iran: an analysis by structural equation modelling (Bahasa Indonesia: Pencucian uang, korupsi dan pembangunan sosial ekonomi di Iran: analisis dengan pemodelan persamaan structural)." *International Review of Economics* 70, no. 3 (2023): 395-417. <https://link.springer.com/article/10.1007/s12232-023-00424-9>
- Dervis, Kemal, and Jeni Klugman. "Measuring human progress: the contribution of the Human Development Index and related indices (Bahasa Indonesia: Mengukur kemajuan manusia: kontribusi Indeks Pembangunan Manusia dan indeks terkait)." *Revue d'économie politique* 121, no. 1 (2011): 73-92. <https://shs.cairn.info/revue-d-economie-politique-2011-1-page-73?tab=texte-integral>
- Diacon, Paula-Elena, and Liviu-George Maha. "The relationship between income, consumption and GDP: A time series, cross-country analysis (Bahasa Indonesia: Hubungan antara pendapatan, konsumsi dan PDB: Analisis lintas negara, deret waktu)." *Procedia economics and finance* 23 (2015): 1535-1543. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00374-3](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00374-3)
- Domashova, Jenny, and Anna Politova. "The Corruption Perception Index: Analysis of dependence on socio-economic indicators (Bahasa Indonesia: Indeks Persepsi Korupsi: Analisis Ketergantungan pada Indikator Sosial Ekonomi)." *Procedia Computer Science* 190 (2021): 193-203.
- Donchev, Dilyan, and Gergely Ujhelyi. "What do corruption indices measure? (Bahasa Indonesia: Apa yang diukur indeks korupsi?)." *Economics & Politics* 26, no. 2 (2014): 309-331.
- FATF. *Indonesia Mutual Evaluation Report 2023* (Bahasa Indonesia: Laporan Evaluasi Timbal Balik Indonesia 2023). 2023. <https://fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/mer/Mutual-Evaluation-Report-Indonesia-2023.pdf.coredownload.inline.pdf> (28th June 2024)
- FATF. *Vietnam Mutual Evaluation Report 2022* (Bahasa Indonesia: Laporan Evaluasi Timbal Balik Vietnam 2022). 2022. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Mer-vietnam-2022.html> (28th June 2024)
- Ferwerda, Joras, & Reuter, Peter. "National Assessments of Money Laundering Risks: Learning from Eight Advanced Countries' NRAs (Bahasa Indonesia: Penilaian Nasional Risiko Pencucian Uang: Belajar dari NRA Delapan Negara Maju)." World Bank Group. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099302204122255265/pdf/IDU02386c9b80f623045e70bf8a09a30b6162595.pdf>
- Galtung, Fredrik. "Measuring the immeasurable: Boundaries and functions of (macro) corruption indices (Bahasa Indonesia: Mengukur hal yang tidak terukur: Batasan dan fungsi indeks korupsi (makro))." *Measuring corruption* (2016): 101-130.
- Gaukroger, Cressida. *A critical assessment of GDP as a measure of economic performance and social progress* (Bahasa Indonesia: Penilaian kritis terhadap PDB sebagai ukuran kinerja ekonomi dan kemajuan sosial). Carnegie UK Trust, 2023. <https://apo.org.au/node/323613>
- Ginting, Jamin, and Adessya Thalia Chairunissa. "Adopting the Financial Action Task Force (FATF) Recommendations in Realizing Beneficial Owners Transparency in Limited Companies to Prevent Money Laundering Criminal Acts in Indonesia (Bahasa Indonesia:

- Penerapan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam Mewujudkan Transparansi Beneficial Owner di Perseroan Terbatas untuk Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia)." *Pt. 2 J. Legal Ethical & Regul. Isses* 24 (2021): 1.
- Hameiri, Shahar, and Lee Jones. "Regulatory regionalism and anti-money-laundering governance in Asia (Bahasa Indonesia: Regionalisme regulasi dan tata kelola anti pencucian uang di Asia)." In *The Contested Rescaling of Economic Governance in East Asia*, pp. 40-59. Routledge, 2017. <https://doi.org/10.1080/10357718.2014.978737>
- Hasibuan, Syarif, Ede Darmawan, and Vetty Permanasari. "Socioeconomic disparities of life expectancy: Analysis of 34 provinces in indonesia as of 2019 (Bahasa Indonesia: Kesenjangan sosial ekonomi harapan hidup: Analisis 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2019)." *Population Medicine* 5 (2023): A805.
- Heywood, Paul M., and Jonathan Rose. "'Close but no Cigar': the measurement of corruption (Bahasa Indonesia: 'Hampir tapi Tidak Berhasil': Pengukuran Korupsi)." *Journal of Public Policy* 34, no. 3 (2014): 507-529.
- Hounta, Elena, & Lehmann, Selvan. "Doing business in high risk countries (Bahasa Indonesia: Melakukan bisnis di negara-negara berisiko tinggi)." *Basel Governance*, Mar-Apr 2015. <https://baselgovernance.org/sites/default/files/2019-01/Doingbusinessinhighriskcountries.pdf>
- Huntington, Samuel P. "Modernization and corruption (Bahasa Indonesia: Modernisasi dan korupsi)." In *Political corruption*, pp. 253-264. Routledge, 2017.
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. *Indonesia-Vietnam Target Bilateral Trade of USD 18 Billion by 2028* (Bahasa Indonesia: Indonesia-Vietnam Targetkan Perdagangan Bilateral Sebesar USD 18 Miliar pada 2028). Indonesia-Vietnam Target. Indonesia, 2024. Website <https://kemlu.go.id/portal/en/read/5871/berita/indonesia-vietnam-target-bilateral-trade-of-usd-18-billion-by-2028> (24th May, 2024)
- Ko, Kilkon, and Ananya Samajdar. "Evaluation of international corruption indexes: Should we believe them or not? (Bahasa Indonesia: Evaluasi indeks korupsi internasional: Haruskah kita mempercayainya atau tidak?)." *The Social Science Journal* 47, no. 3 (2010): 508-540.
- Koeswayo, Poppy Sofia, Sofik Handoyo, and Dede Abdul Hasyir. "Investigating the Relationship between Public Governance and the Corruption Perception Index (Bahasa Indonesia: Meneliti Hubungan antara Tata Kelola Publik dan Indeks Persepsi Korupsi)." *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 2342513.
- Lucian-Liviu, A. L. B. U. "Trends in the interest rate–investment–GDP growth relationship (Bahasa Indonesia: Tren hubungan antara suku bunga–investasi–pertumbuhan PDB)." *Romanian Journal of Economic Forecasting* 5 (2006). https://www.researchgate.net/profile/Lucian-Albu-2/publication/24049585_Trends_in_the_Interest_Rate_-_Investment_-_GDP_Growth_Relationship/links/54b9eb330cf2d11571a4bac1/Trends-in-the-Interest-Rate-Investment-GDP-Growth-Relationship.pdf
- Mahadika, Iman Naufal, Salih Kalayci, and Nihal Altun. "Relationship between GDP, foreign direct investment and export volume: Evidence from Indonesia (Bahasa Indonesia: Hubungan antara PDB, investasi asing langsung dan volume ekspor: Bukti dari Indonesia)." *International Journal of Trade, Economics and Finance* 8, no. 1 (2017): 51-54. https://www.researchgate.net/profile/Salih-Kalayci/publication/316919541_Relationship_between_GDP_Foreign_Direct_Investment_and_Export_Volume_Evidence_from_Indonesia/links/5918ba0fa6fdcc963e869d8d/Relationship-between-GDP-Foreign-Direct-Investment-and-Export-Volume-Evidence-from-Indonesia.pdf
- Mahdavifar, Neda, Farhad Towhidi, Behnam Reza Makhsosi, Reza Pakzad, Ali Moini, Abbas Ahmadi, Sarah Lotfi, and Hamid Salehiniya. "Incidence and mortality of nasopharynx

- cancer and its relationship with human development index in the world in 2012 (Bahasa Indonesia: Insiden dan mortalitas kanker nasofaring serta hubungannya dengan indeks pembangunan manusia di dunia tahun 2012)." *World journal of oncology* 7, no. 5-6 (2016): 109. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5624652/>
- Manning, Matthew, Gabriel TW Wong, and Nada Jevtovic. "Investigating the relationships between FATF recommendation compliance, regulatory affiliations and the Basel Anti-Money Laundering Index (Bahasa Indonesia: Menyelidiki hubungan antara kepatuhan terhadap rekomendasi FATF, afiliasi regulasi dan Indeks Anti Pencucian Uang Basel)." *Security Journal* 34 (2021): 566-588. <https://doi.org/10.1057/s41284-020-00249-z>
- McGillivray, Mark, and Howard White. "Measuring development? The UNDP's human development index (Bahasa Indonesia: Mengukur pembangunan? Indeks pembangunan manusia UNDP)." *Journal of International Development* 5, no. 2 (1993): 183-192.
- Menski, Werner F. *Comparative law in a global context: the legal systems of Asia and Africa* (Bahasa Indonesia: Hukum perbandingan dalam konteks global: sistem hukum Asia dan Afrika). Cambridge University Press, 2006.
- Meurer, Roberto. "Portfolio investment flows, GDP, and investment in brazil (Bahasa Indonesia: Arus investasi portofolio, PDB, dan investasi di Brasil)." *International Journal of Economics and Finance* 8, no. 12 (2016): 1-9. https://econpapers.repec.org/article/ibnijefaa/v_3a8_3ay_3a2016_3ai_3a12_3ap_3a1-9.htm
- Mirahmadizadeh, Alireza, Mousa Ghelichi-Ghojogh, Mohebat Vali, Kimia Jokari, Haleh Ghaem, Abdolrasool Hemmati, Fatemeh Jafari et al. "Correlation between human development index and its components with COVID-19 indices: a global level ecologic study (Bahasa Indonesia: Korelasi antara indeks pembangunan manusia dan komponen-komponennya dengan indeks COVID-19: studi ekologi tingkat global)." *BMC Public Health* 22, no. 1 (2022): 1549. <https://link.springer.com/article/10.1186/s12889-022-13698-5>
- Miller, William L. "Perceptions, experience and lies: What measures corruption and what do corruption measures measure? (Bahasa Indonesia: Persepsi, pengalaman dan kebohongan: Apa yang mengukur korupsi dan apa yang diukur oleh ukuran korupsi?)." In *Measuring corruption*, pp. 163-186. Routledge, 2016.
- Morse, Julia C. "Blacklists, market enforcement, and the global regime to combat terrorist financing (Bahasa Indonesia: Daftar hitam, penegakan pasar, dan rezim global untuk memerangi pendanaan teroris)." *International Organization* 73, no. 3 (2019): 511-545. doi:10.1017/s002081831900016x
- Mulinge, Munyae M., and Gwen N. Lesetedi. "Interrogating our past: colonialism and corruption in Sub-Saharan Africa (Bahasa Indonesia: Mempertanyakan masa lalu kita: kolonialisme dan korupsi di Afrika Sub-Sahara)." *African Journal of Political Science/Revue Africaine de Science Politique* (1998): 15-28.
- Nainggolan, Lora Ekana, Darwin Lie, Nana Triapnita Nainggolan, and Robert Tua Siregar. "How Determinants of the Human Development Index Impact Indonesia (Bahasa Indonesia: Bagaimana Faktor Penentu Indeks Pembangunan Manusia Berdampak pada Indonesia)." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 5, no. 2 (2022): 687-700.
- Negara, Kementerian Sekretariat. "Presiden Apresiasi Keanggotaan Penuh Indonesia Dalam FATF." Kementerian Sekretariat Negara. Accessed October 18, 2024. https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_apresiasi_keanggotaan_penuh_indonesia_dalam_fatf.

- Nguyen, Anh. "Factors Affecting Life Expectancy in Vietnam, Laos, Cambodia (Bahasa Indonesia: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harapan Hidup di Vietnam, Laos, dan Kamboja)." *Global Journal of Public Health Medicine* 4, no. 1 (2022): 537-546.
- Nguyen, Dinh Tuan. "Multidimensional poverty and human development of Vietnam in comparison with some Southeast Asian countries (Bahasa Indonesia: Kemiskinan multidimensi dan pembangunan manusia di Vietnam dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara)." *The Russian Journal of Vietnamese Studies* 6, no. 1 (2022): 40-51. https://vietnamjournal.ru/2618-9453/article/view/105388/pdf_2
- Nguyen, Minh-Ngoc. "GDP contribution of the manufacturing sector in Vietnam from 2018 to 2023 (Bahasa Indonesia: Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB di Vietnam dari tahun 2018 hingga 2023)." Statista. 2024. Website, <https://www.statista.com/statistics/1047681/vietnam-gdp-contribution-of-manufacturing-sector/> (6th June 2024)
- Nguyễn, Văn Đại. "Policy Implications for Human Development of Vietnam from the History of HDI (Bahasa Indonesia: Implikasi Kebijakan terhadap Pembangunan Manusia di Vietnam dari Sejarah IPM)." *VNU Journal Of Economics And Business* 30, no. 5E (2014).
- Obydenkova, Anastassia, and Alexander Libman. "Understanding the survival of post-communist corruption in contemporary Russia: The influence of historical legacies (Bahasa Indonesia: Memahami kelangsungan hidup korupsi pasca-komunis di Rusia kontemporer: Pengaruh warisan sejarah)." *Post-Soviet Affairs* 31, no. 4 (2015): 304-338.
- Ofoeda, Isaac, Elikplimi K. Agbloyor, Joshua Y. Abor, and Kofi A. Osei. "Anti-money laundering regulations and financial sector development (Bahasa Indonesia: Peraturan anti pencucian uang dan pengembangan sektor keuangan)." *International Journal of Finance & Economics* 27, no. 4 (2022): 4085-4104. <https://doi.org/10.1002/jid.3582>
- Parveen, Rehana. "Impact of anti-money laundering legislation in the United Kingdom and European Union (Bahasa Indonesia: Dampak undang-undang anti pencucian uang di Inggris dan Uni Eropa)." *International Journal of Economics and Management Systems* 5 (2020).
- Pavlidis, Georgios. "Financial action task force and the fight against money laundering and the financing of terrorism: Quo vadimus? (Bahasa Indonesia: Satuan tugas aksi keuangan dan perang melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme: *Kemana kita akan pergi?*)." *Journal of Financial Crime* 28, no. 3 (2021): 765-773. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2019-0124>
- Pavlidis, Georgios. "The dark side of anti-money laundering: Mitigating the unintended consequences of FATF standards (Bahasa Indonesia: Sisi gelap anti pencucian uang: Mengurangi konsekuensi yang tidak diinginkan dari standar FATF)." *Journal of Economic Criminology* 2 (2023): 100040. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100040>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 Tahun 2023. Otoritas Jasa Keuangan
- PPATK. *Indonesia National Risk Assessment (NRA) on Money Laundering 2021* (Bahasa Indonesia: Penilaian Risiko Nasional (NRA) Indonesia terhadap Pencucian Uang Tahun 2021). 2021. https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1674615788_.pdf (28th June 2024)
- PPATK. *Indonesia National Risk Assessment (NRA) on Money Laundering 2021* (Bahasa Indonesia: Penilaian Risiko Nasional (NRA) Indonesia terhadap Pencucian Uang Tahun 2021). 2021. <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/189/indonesia-national-risk-assessment-nra-on-money-laundering-2021.html> (12th July 2024)
- Pramudyani, Yashinta Difa. "Indonesia-Vietnam Sepakat Tingkatkan Target Perdagangan Bilateral 18 Miliar Dolar AS – AntaraNews." Antara News, April 24, 2024. <https://sumut.antaranews.com/berita/568593/indonesia-vietnam-sepakat-tingkatkan-target-perdagangan-bilateral-18-miliar-dolar-as>.

- Putri, Mega Amelia, Hefrizal Handra, and Efa Yonnedi. "The role of human resource investment in increasing the human development index: Comparative study of Indonesia and Vietnam (Bahasa Indonesia: Peran investasi sumber daya manusia dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia: Studi perbandingan Indonesia dan Vietnam)." https://www.researchgate.net/profile/Mega-Putri-21/publication/381965724_The_role_of_human_resource_investment_in_increasing_the_human_development_index_Comparative_study_of_Indonesia_and_Vietnam/links/66868cde0a25e27fbc242ebf/The-role-of-human-resource-investment-in-increasing-the-human-development-index-Comparative-study-of-Indonesia-and-Vietnam.pdf
- Quang, Ngo. "Good Governance and Human Development in Vietnam: Spatial Empirical Evidence (Bahasa Indonesia: Tata Kelola yang Baik dan Pembangunan Manusia di Vietnam: Bukti Empiris Spasial)." *International Journal of Economics and Financial Issues* 7, no. 5 (2017): 93.
- Rengganis, Fany Dewi, and Dwi Setiawan Susanto. 2023. "Evaluation of the Anti-Money Laundering Programs Implementation in Indonesia (Bahasa Indonesia: Evaluasi Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang di Indonesia)". *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 9 (2):229-40. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.973>
- Rohwer, Anja. "Measuring corruption: a comparison between the transparency international's corruption perceptions index and the World Bank's worldwide governance indicators (Bahasa Indonesia: Mengukur korupsi: perbandingan antara indeks persepsi korupsi dari Transparency International dan indikator tata kelola global dari Bank Dunia)." *CESifo DICE Report* 7, no. 3 (2009): 42-52.
- Rubinstein, William D. "The end of "old corruption" in Britain 1780–1860 (Bahasa Indonesia: Akhir dari "korupsi lama" di Inggris 1780–1860)." *Past & Present* 101, no. 1 (1983): 55-86.
- Sagar, Ambuj D., and Adil Najam. "The human development index: a critical review (Bahasa Indonesia: Indeks pembangunan manusia: tinjauan kritis)." *Ecological Economics* 25, no. 3 (1998): 249-264.
- Saputro, Suhendi Ery, Muhammad Zilal Hamzah, and Budi Santosa. "Determinant Factors of Human Development and Its Impact on Level of Productivity in ASEAN Countries (Bahasa Indonesia: Faktor Penentu Pembangunan Manusia dan Dampaknya terhadap Tingkat Produktivitas di Negara-negara ASEAN)." In *Proceedings of the International Conference on Sustainable Collaboration in Business, Technology, Information, and Innovation (SCBTII 2023)*, vol. 265, p. 312. Springer Nature, 2023.
- SBV. *Vietnam - National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorism Financing* (Bahasa Indonesia: Vietnam - Penilaian Risiko Nasional Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme). 2018. <https://www.sbv.gov.vn/webcenter/ShowProperty?nodeId=/UCMServer/SBV412019/idcPrimaryFile&revision=latestreleased> (12th July 2024)
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. *President Jokowi Appreciates Indonesia's FATF Membership* (Bahasa Indonesia: Presiden Jokowi Apresiasi Keanggotaan Indonesia di FATF). Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation. Indonesia, 2024. Website, <https://setkab.go.id/en/president-jokowi-appreciates-indonesias-fatf-membership/> (5th June 2024)
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "President Jokowi Appreciates Indonesia's FATF Membership (Bahasa Indonesia: Presiden Jokowi Apresiasi Keanggotaan Indonesia di FATF)." Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation. Indonesia, 2024
- Šikman, Mile M., and Miloš Grujić. "Relationship of Anti-Money Laundering Index with GDP, financial market development, and Human Development Index (Bahasa Indonesia:

- Hubungan Indeks Anti Pencucian Uang dengan PDB, Perkembangan Pasar Keuangan, dan Indeks Pembangunan Manusia)." *NBP. Nauka, bezbednost, policija* 26, no. 1 (2021): 21-33. <https://doi.org/10.5937/nabepo26-29725>
- Syafri, Sumiyarti, Khoriro Handayani Firdayeti, and K. Handayani. "Determinants of human development index: Case study of provinces in Indonesia (Bahasa Indonesia: Faktor-faktor yang Menentukan Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Provinsi-provinsi di Indonesia)." In *LePALISSHE 2021: Proceedings of the First Lekantara Annual Conference on Public Administration, Literature, Social Sciences, Humanities, and Education*, pp. 451-457. 2022
- Tran, Thu Thi Hoai, and Gregory Rose. "The legal framework for prosecution of money laundering offences in Vietnam (Bahasa Indonesia: Kerangka hukum untuk penuntutan tindak pidana pencucian uang di Vietnam)." *Austl. J. Asian L.* 22 (2022): 35. <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ajal22&div=5&id=&page=>
- Tran, Thu Thi Hoai, and Louis De Koker. "Confiscation of proceeds of crime in Vietnam: improving the legal framework (Bahasa Indonesia: Penyitaan hasil kejahatan di Vietnam: memperbaiki kerangka hukum)." *Journal of Money Laundering Control* 24, no. 2 (2021): 215-233. <https://doi.org/10.1108/JMLC-11-2020-0123>
- Tsao, Yao Chun, and Shun Jen Hsueh. "Can the country's perception of corruption change? evidence of corruption perception index (Bahasa Indonesia: Dapatkah persepsi suatu negara terhadap korupsi berubah? bukti indeks persepsi korupsi)." *Public Integrity* 25, no. 4 (2023): 415-427.
- Tuba, David. "Prosecuting money laundering the FATF way: An analysis of gaps and challenges in South African legislation from a comparative perspective (Bahasa Indonesia: Menuntut pelaku pencucian uang dengan cara FATF: Analisis kesenjangan dan tantangan dalam undang-undang Afrika Selatan dari perspektif komparatif)." *Acta Criminologica: African Journal of Criminology & Victimology* 2012, no. sed-2 (2012): 103-122. <https://journals.co.za/doi/abs/10.10520/EJC138480>
- Undang-Undang No.: 07/2012/QH13. The Government Socialist Republic of Vietnam (Bahasa Indonesia: Pemerintah Republik Sosialis Vietnam)
- Undang-Undang No.74/2005/ND-CP. The Government Socialist Republic of Vietnam (Bahasa Indonesia: Pemerintah Republik Sosialis Vietnam)
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Van Thai, Ha. "Anti-money laundering and countering financing of terrorism legislation in Vietnam: Criminalization, Practice and Challenges (Bahasa Indonesia: Undang-undang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Vietnam: Kriminalisasi, Praktik dan Tantangan)." *Essays of Faculty of Law University of Pécs, Yearbook of 2021-2022* 1 (2023). <https://doi.org/10.15170/studia.2023.01>
- Vietnam Export Data (Bahasa Indonesia: Data Ekspor Vietnam). *TradeImex*, unknown, <https://www.tradeimex.in/vietnam-export> (6th June 2024)
- Vietnam's Customs (Bahasa Indonesia: Bea Cukai Vietnam). *Preliminary assessment of Vietnam international merchandise trade performance in the second half of December* (Bahasa Indonesia: Penilaian awal kinerja perdagangan barang internasional Vietnam pada paruh kedua bulan Desember), 2023. Preliminary assessment of. Vietnam, 2024. Website <https://www.customs.gov.vn/index.jsp?pageId=4967&tkId=7164> (31st May, 2024)

- Vinh, Luu Dinh, and Nguyen Minh Tri. "Human Development in Vietnam: A Systematic Review (Bahasa Indonesia: Pembangunan Manusia di Vietnam: Tinjauan Sistematis)." *International Journal of Sustainable Development & Planning* 19, no. 8 (2024).
- Yumashev, Alexei, Beata Ślusarczyk, Sergey Kondrashev, and Alexey Mikhaylov. "Global indicators of sustainable development: Evaluation of the influence of the human development index on consumption and quality of energy (Bahasa Indonesia: Indikator global pembangunan berkelanjutan: Evaluasi pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap konsumsi dan kualitas energy)." *Energies* 13, no. 11 (2020): 2768. <https://www.mdpi.com/1996-1073/13/11/2768>
- Zeng, Ziqian, Jiali Chen, Changfeng Xiao, and Weizhong Chen. "A global view on prevalence of hypertension and human develop index (Bahasa Indonesia: Pandangan global tentang prevalensi hipertensi dan indeks pembangunan manusia)." *Annals of Global Health* 86, no. 1 (2020). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7333558/>
- Zhang, Yixin, and Zhijie Wu. "Environmental performance and human development for sustainability: Towards to a new Environmental Human Index (Bahasa Indonesia: Kinerja lingkungan dan pembangunan manusia untuk keberlanjutan: Menuju Indeks Lingkungan dan Manusia yang baru)." *Science of the Total Environment* 838 (2022): 156491. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.156491>
- Zouaoui, Azzouz, Anas Al Qudah, and Mounira Ben-Arab. "World corruption perception index analysis (Bahasa Indonesia: Analisis indeks persepsi korupsi dunia)." *Research Journal of Finance and Accounting* 8, no. 24 (2017).
- "17 Hành Động Thực Hiện Cam Kết Của Việt Nam về Phòng, Chống Rửa Tiền, Tài Trợ KHỦNG BỐ (Bahasa Indonesia: Tindakan untuk Melaksanakan Komitmen Vietnam dalam Mencegah dan Memerangi Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris)." Thanh tra Việt Nam. Accessed October 21, 2024. <https://thanhtravietnam.vn/thuc-tien-va-chinh-sach/thanh-tra-voi-nhiem-vu-phong-chong-rua-tien/17-hanh-dong-thuc-hien-cam-ket-cua-viet-nam-ve-phong-chong-rua-tien-tai-tro-khung-bo-207511.html>.
- "About APG: APG History and Background (Bahasa Indonesia: Tentang APG: Sejarah dan Latar Belakang APG)." APGML. Accessed October 21, 2024. <https://apgml.org/about-us/page.aspx?p=91ce25ec-db8a-424c-9018-8bd1f6869162>.
- "About APG (Bahasa Indonesia: Tentang APG)." Mutual Evaluations. Accessed October 14, 2024. <https://apgml.org/about-us/page.aspx?p=ac38f87e-2341-43e6-84b2-4dbd6346f6c3>.
- "About the Non-Cooperative Countries and Territories NCCT Initiative (Bahasa Indonesia: Tentang Inisiatif NCCT Negara dan Wilayah Non-Kooperatif)." FATF. Accessed October 14, 2024. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/Aboutthenon-cooperativecountriesandterritoriesncctinitiative.html>.
- "Cambodia and Canada Discussed on Deepening Bilateral Relations (Bahasa Indonesia: Kamboja dan Kanada Bahas Peningkatan Hubungan Bilateral)." Kingdom of Cambodia, Ministry of Foreign Affairs & International Cooperation. Accessed November 26, 2024. <https://www.mfaic.gov.kh/posts/2024-10-11-Press-Release-Cambodia-and-Canada-Discussed-on-Deepening-Bilateral-Relations-17-36-27>
- "Corruption Perceptions Index: Frequently Asked Questions (Bahasa Indonesia: Indeks Persepsi Korupsi: Pertanyaan yang Sering Diajukan)." Transparency International. Accessed December 1, 2024.
- "Corruption Perceptions Index 2023: Full Source Description (Bahasa Indonesia: Indeks Persepsi Korupsi 2023: Deskripsi Sumber Lengkap)." Transparency International. Accessed December 1, 2024.
- "Corruption Perceptions Index 2023 (Bahasa Indonesia: Indeks Persepsi Korupsi 2023)." Transparency International. Accessed December 1, 2024: <https://images.transparencycdn.org/images/CPI-2023-Report.pdf>

- “Executive Summary MER Indonesia 2023 (Bahasa Indonesia: Ringkasan Eksekutif MER Indonesia 2023).” FATF. <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/mer/Executive-Summary-Mutual-Evaluation-Report-Indonesia-2023.pdf.coredownload.inline.pdf>
- “FATF Public Statement, 18 October 2013 (Bahasa Indonesia: Pernyataan Publik FATF, 18 Oktober 2013).” FATF. Accessed October 24, 2024. <https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Fatf-public-statement-oct-2013.html>
- “FATF Public Statement - 16 February 2012 (Bahasa Indonesia: Pernyataan Publik FATF – 16 Februari 2012).” FATF. Accessed October 14, <https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Fatfpublicstatement-16february2012.html>
- “FATF Public Statement - 21 June 2013 (Bahasa Indonesia: Pernyataan Publik FATF – 21 Juni 2013).” FATF. Accessed October 24, 2024. <https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Public-statement-june-2013.html>.
- “FATF - Review to Identify Non-Cooperative Countries or Territories (Bahasa Indonesia: FATF – Tinjauan untuk Mengidentifikasi Negara atau Wilayah yang Tidak Kooperatif).” FATF, June 22, 2001. <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/annual-reports/2000%202001%20NCCT%20ENG.pdf>
- “GDP (current US\$) (Bahasa Indonesia: PDB (US\$ saat ini)).” Data World Bank. Accessed November 9, 2024. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD>
- “GDP contribution of the manufacturing sector in Vietnam from 2018 to 2023 (Bahasa Indonesia: Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB di Vietnam dari tahun 2018 hingga 2023).” Statista, October 24, 2024. <https://www.statista.com/statistics/1047681/vietnam-gdp-contribution-of-manufacturing-sector/>
- “Human Development Index (Bahasa Indonesia: Indeks Pembangunan Manusia).” Human Development Reports, June 4, 2024. https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index?_gl=1%2A1akcmd%2A_gcl_au%2AOTA3OTU1MjU5LjE3MjkwNjU2OTg.%2A_ga%2ANDY3MjM5NDYzLjE3MjgyNzE5ODQ.%2A_ga_3W7LPK0WP1%2AMTczMDY5NDAYMi43LjEuMTczMDY5NDIyMy40Ni4wLjA.#/indices/HDI.
- “Human Development Report 2021/2022 (Bahasa Indonesia: Laporan Pembangunan Manusia 2021/2022).” UNDP. https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22reportenglish_0.pdf
- “Human Development Report 2023/2024 (Bahasa Indonesia: Laporan Pembangunan Manusia 2023/2024).” UNDP. <https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2023-24reporten.pdf>
- “IMF Country Report No. 24/306 VIETNAM 2024 ARTICLE IV CONSULTATION—PRESS RELEASE; STAFF REPORT; AND STATEMENT BY THE EXECUTIVE DIRECTOR FOR VIETNAM (Bahasa Indonesia: Laporan Negara IMF No. 24/306 Vietnam 2024 Pasal IV Konsultasi—Siaran Pers; Laporan Staf; dan Pernyataan Direktur Eksekutif untuk Vietnam).” International Monetary Fund. (2024).
- “India-Nepal Hold Bilateral Meeting to Combat Money Laundering (Bahasa Indonesia: India-Nepal Gelar Pertemuan Bilateral untuk Memerangi Pencucian Uang).” Diplomacy & Beyond. Accessed November 26, 2024. <https://diplomacybeyond.com/india-nepal-hold-bilateral-meeting-to-combat-money-laundering/>
- “Indonesia: GDP Share by Sector 2023 (Bahasa Indonesia: Indonesia: Pangsa PDB menurut Sektor 2023).” Statista, October 24, 2024. <https://www.statista.com/statistics/1019099/indonesia-gdp-contribution-by-industry/>.

- “Indonesia Resmi Jadi Anggota Penuh FATF, Menkeu: Bawa Dampak Positif Bagi Kredibilitas Perekonomian Negara.” Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Accessed October 18, 2024. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Indonesia-Resmi-Jadi-Anggota-Penuh-FATF>.
- “Jurisdictions under Increased Monitoring - 23 June 2023 (Bahasa Indonesia: Yurisdiksi di bawah Pengawasan Ketat – 23 Juni 2023).” FATF. Accessed October 26, 2024. <https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-june-2023.html>
- “Life Expectancy at Birth, Total (Years) (Bahasa Indonesia: Harapan Hidup saat Lahir, Total (Tahun)).” World Bank Open Data. Accessed November 5, 2024. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN>.
- “Lực Lượng Đặc Nhiệm Tài Chính VỀ Chống Rửa Tiền (Bahasa Indonesia: Satgas Keuangan Bidang Pencucian Uang).” Quân đội nhân dân Việt Nam. Accessed October 21, 2024. <https://www.qdnd.vn/phap-luat/cac-van-de/hanh-dong-quyet-liet-de-dua-viet-nam-ra-khoi-danh-sach-giam-sat-tang-cuong-ve-chong-rua-tien-747658>.
- “Membedah Peran Aktif Indonesia dalam Pertemuan Tahunan FATF.” PPATK. Accessed November 26, 2024. <https://www.ppatk.go.id/news/read/1403/membedah-peran-aktif-indonesia-dalam-pertemuan-tahunan-fatf.html>
- “Members & Observers: Vietnam (Bahasa Indonesia: Anggota dan Pengamat: Vietnam).” Asia / Pacific Group On Money Laundering. Accessed October 21, 2024. <https://apgml.org/members-and-observers/members/details.aspx?m=408d50ed-b52b-4a69-9fde-71829770955b>.
- “Members & Observers Document: Vietnam (Bahasa Indonesia: Dokumen Anggota dan Pengamat: Vietnam).” Asia / Pacific Group On Money Laundering. Accessed October 21, 2024. <https://apgml.org/members-and-observers/members/member-documents.aspx?m=408d50ed-b52b-4a69-9fde-71829770955b>
- “Membership Criteria (Bahasa Indonesia: Kriteria Keanggotaan).” FATF. Accessed November 9, 2024. <https://www.fatf-gafi.org/en/the-fatf/membership-process-criteria.html>
- “Mutual Evaluation Home (Bahasa Indonesia: Evaluasi Timbal Balik).” FATF. Accessed October 14, 2024. <https://www.fatf-gafi.org/en/topics/mutual-evaluations.html>.
- “Public Statement - 24 October 2014. (Bahasa Indonesia: Pernyataan Publik FATF – 24 Oktober 2014)” FATF. Accessed October 14, <https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Public-statement-oct2014.html>
- “Public Statement - October 2019 (Bahasa Indonesia: Pernyataan Publik FATF – Oktober 2019).” FATF. Accessed October 14, <https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Public-statement-october-2019.html>
- “Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor, 2023, Buku I.” Badan Pusat Statistik Indonesia. Accessed October 29, 2024. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/07/05/aacd81374f3ae5d241c14598/statistik-perdagangan-luar-negeri-indonesia-ekspor--2023--buku-i.html>.
- “Tổng Cục Hải Quan Việt Nam (Bahasa Indonesia: Departemen Umum Bea Cukai Vietnam).” Tổng cục Hải Quan Việt Nam. Accessed October 29, 2024. <https://www.customs.gov.vn/index.jsp?pageId=4967&tkId=7164>.
- “UAE Executive Office Of AML/CTF meets with Kazakh Financial Monitoring Agency to strengthen cooperation (Bahasa Indonesia: Kantor Eksekutif AML/CTF UEA bertemu dengan Badan Pemantauan Keuangan Kazakhstan untuk memperkuat kerja sama).” Emirates News Agency (WAM). Accessed November 26, 2024. <https://www.wam.ae/en/article/hszrha96-uae-executive-office-amlctf-meets-with-kazakh>

- “Vietnam's measures to combat money laundering and terrorist financing 2022 (Bahasa Indonesia: Langkah-langkah Vietnam untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris pada tahun 2022).” FATF. Accessed October 24, 2024. <https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Mutualevaluations/Mer-vietnam-2022.html>
- “Vietnam Import Data (Bahasa Indonesia: Data Impor Vietnam).” TradeImex. Accessed September 24, 2024. <https://www.tradeimex.in/vietnam-import>